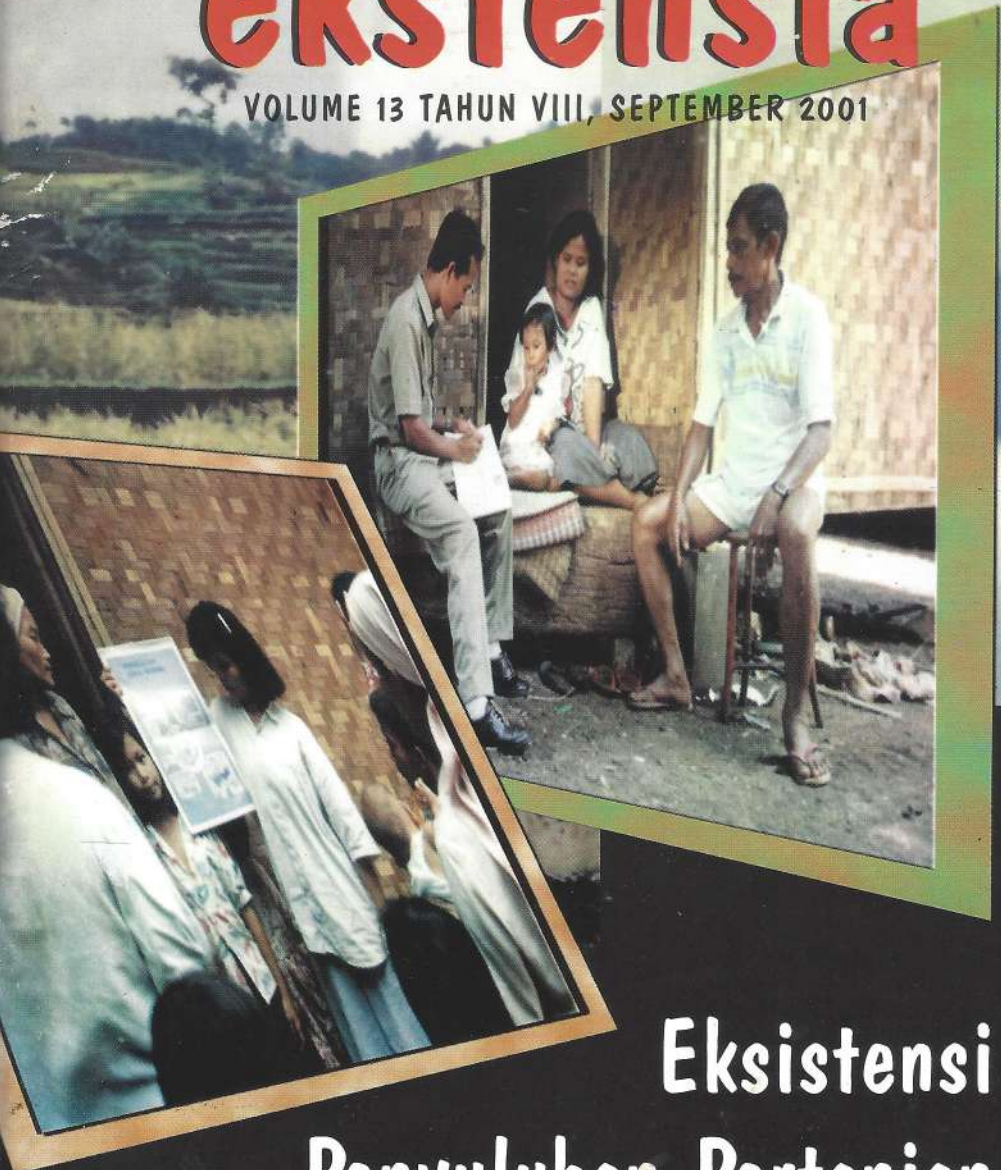


ISSN NO. 0853 - 5922

ekstensia

VOLUME 13 TAHUN VIII, SEPTEMBER 2001



**Eksistensi
Penyuluhan Pertanian
di Era Otonomi Daerah**

ekstensia

MAJALAH PENYULUH PERTANIAN

- I. Pelindung : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- II. Penanggung Jawab : Ir. Moch. Anas Rasyid, M.Ed.
Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
- III. Pengarah Materi : 1. Ir. M. Ridha Ismail
2. Ir. Diana Prasastyawati, M.Si.
3. Ir. Zahir Zachri, MA
4. Ir. A. Hernowo
- IV. Tim Penyunting :
Ketua : Ir. Subagyo
Sekretaris : Ir. Andi Sumarga
Anggota : 1. Ir. Santoso Wibowo, MM
2. Ir. Shalimar Andaya
3. Ir. Syarifuddin Hattab
4. Ir. Harnida Harun
5. Ir. Abdullah Syarief
6. Ir. Hotman
7. Ir. Rusmini, M.Si.
8. Ir. I. Wayan Ediana
9. Ir. Wieke Witanti
10. Bambang Paryono, SH
- V. Tata usaha : 1. Wikono Hartono, SE, MM
2. Ir. Lindawati Anggoto, MM
3. Havid Mahyuddin, BSc.
4. Joko Samiyono, SP
- VI. Administrasi/Keuangan : S o d i r i n
- VII. Distribusi : 1. Ir. Erwin Zulkarnaen
2. Ir. Puji Prabowo
3. Retnaningsih

Salam dari Redaksi

Pada penerbitan ini Ekstensia mencoba mengedepankan topik yaitu “Eksistensi Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi”. Topik tersebut sengaja dikedepankan di tengah-tengah euphoria kebebasan yang mengawali era otonomi. Kekhawatiran dari para pemerhati penyuluhan pertanian, khususnya para Penyuluh Pertanian, yaitu akan tidak eksisnya penyuluhan pertanian apabila diserahkan kepada Daerah.

Sepintas memang terasa wajar kalau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan keterbatasan sumber anggaran, melupakan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai markasnya Penyuluh Pertanian. Secara tidak langsung memang kelembagaan penyuluhan pertanian tidak menghasilkan PAD. Tetapi kalau dipikir secara rasional, keberhasilan penyuluhan akan meningkatkan pendapatan petani. Petani merupakan bagian terbesar dari masyarakat. Peningkatan pendapatan petani berarti akan meningkatkan kegiatan perekonomian Daerah, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah masyarakat di wilayah.

Cara berfikir yang rasional itulah yang dapat memberikan energi dan mengembalikan kepercayaan Daerah, untuk dapat membangun sistem penyuluhan pertanian melalui suatu kelembagaan penyuluhan pertanian. Dari hasil monitoring Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, banyak BIPP tidak eksis lagi sebagai kelembagaan fungsional penyuluhan pertanian. Kondisi yang demikian yang terkena dampaknya adalah para penyuluh pertanian, baik nasibnya pengembangan profesionalismenya. Akibatnya para petani tidak dapat mendapatkan penyuluhan sebagaimana yang diharapkan.

Kemudian untuk melengkapi informasi, disajikan dalam rubrik-rubriknya antara lain : Kepedulian Pemerintah Kabupaten Donggala, dan bagaimana orientasi pembangunan pertanian; kebijakan SDM dan penyuluhan pertanian, eksistensi kelembagaan penyuluhan pertanian di Barito Selatan, sosok seorang pengusaha agribisnis dari Jawa Timur, wawasan pakar-pakar ekonomi kerakyatan, dan informasi Penyuluhan Pertanian lainnya.

Harapan Ekstensia semua informasi yang disajikan dapat berguna bagi para pembaca, khususnya para penyuluh pertanian, para penyelenggara pembangunan pertanian dan penyuluhan pertanian, petugas dan aparat terkait, dalam melaksanakan tugasnya, untuk dapat memberikan fasilitas dan pelayanan kepada petani dan masyarakat pada umumnya, sehingga tercapai tujuan pembangunan di negeri kita tercinta ini. Amin.

Redaksi



GAPURA 1

DAFTAR ISI 2

PROGRAM

Kelembagaan Pengembangan SDM Pertanian
Dimantapkan 3
Sangat Diperlukan Kegiatan Penyuluhan Pertanian 8
Surat Edaran 15

WAHANA

Suatu Tranformasi Sosial Petani-Nelayan Kecil Menjadi
Unit Ekonomi di Pedesaan 22
Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kabupaten
Indramayu Masih "Eksis" 28
Mempertahankan Eksistensi Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian 32

SOSOK

Unggul Abinowo: Memadukan Beragam Jenis Usahatani
Sebagai Kunci Sukses Agribisnis 37
John Kliwon Manik: Usaha Tani Tumpuan Hidupku 42

WAWASAN

Mereka yang Menghasilkan, Harus Menikmati 46
Aspek Sosio-Budaya dan Peningkatan Daya Saing
Pertanian "Tradisional" 51

OPINI

Mengacu Kepada Pola Penumbuhan Kemandirian Petani 57
Diklat Penyetaraan D.III Bagi Penyuluh Pertanian 59
Penyuluh Tidak "Tidur" 61

SWADAYA

Citra Aktualisasi Diri Petani-Nelayan Mandiri 67
Banyak Ragam Pengendalian Hama Walang Sangat
Tanpa Insektisida 71

GEMA

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian 75
Pertemuan *Tenth Asean Farmers' Week 2001* di Malaysia 79



Dr. Sinis Munandar

Dengan Pondasi Filosofi : Kelembagaan Pengembangan SDM Pertanian Dimantapkan

SECARA umum pengertian sumberdaya manusia dalam melaksanakan suatu proses pembangunan harus diartikan bahwa manusia itu adalah subjek pembangunan. “Artinya, dia adalah orang-orang yang melakukan suatu proses pembangunan itu”, papar Dr. Ir. Sinis Munandar MS, Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian. Karenanya, untuk keberhasilan pembangunan diperlukan pelaku-pelaku yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Secara spesifik, pengertian tentang sumberdaya pertanian adalah orang-orang sebagai subjek pelaku pembangunan di bidang pertanian. Dengan demikian, dia akan melakukan suatu proses pembangunan di bidang pertanian yang tentu saja mereka juga harus merupakan sumberdaya manusia yang profesional dan berkualitas

Pembinaan sumberdaya manusia di bidang pertanian diarahkan untuk mendorong atau membudayakan sumberdaya manusia tersebut, agar mereka mampu merubah perilaku sebelumnya, misalnya, selama ini mereka telah terbiasa dengan sifat

yang pasif dan hanya menunggu dan bekerja secara tradisional. Di sini kita harus mengubah sikap perilaku tersebut, sehingga pada gilirannya mereka mempunyai sikap proaktif, mampu mencari, dan mampu menguasai teknologi. Selain itu, mereka juga harus senantiasa mampu melakukan pembelajaran-pembelajaran dalam rangka meningkatkan profesionalisme masing-masing.

Pondasi

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, sebelum kita berbicara kepada *action*, maka kita harus meletakkan dulu pondasi kualitas sumberdaya pertanian yang kita inginkan. Sebagai pondasinya, kita perlu berpegang pada landasan filosofis terlebih dahulu. Pondasi ini nantinya akan mendasari kegiatan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pondasi filosofi yang pertama adalah budi pekerti. Kenapa demikian? Karena, pada dasarnya sungguhpun orang itu pandai dan bahkan profesional sekali pun, bila budi pekertinya tidak baik, tentu saja tidak bisa diharapkan

Kita harus meletakkan dulu pondasi kualitas sumberdaya pertanian yang kita inginkan.

untuk mampu mengelola proses pembangunan pertanian secara baik dan benar.

Kedua, sumberdaya manusia yang akan kita bangun itu adalah untuk menjadi manusia-manusia yang rajin, tekun, mau bekerja keras, mampu memanfaatkan setiap peluang dan mampu melakukan hal-hal yang produktif. Diharapkan dia juga selalu disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Ketiga, mereka juga harus mampu melakukan kerjasama. Karena jika dilakukan secara individual tidak mungkin mampu meningkatkan kesejahteraan. Maka, mau tidak mau mereka harus melakukan kerjasama, baik antar individu maupun antar kelompok. Tentu saja pada kerjasama dengan skala yang lebih besar akan terjadi *sinergi* yang lebih besar pula, sehingga akan mampu mengembangkan program, perencanaan, serta pelaksanaan kegiatan

secara benar, yang akhirnya akan mencapai kesejahteraan seperti yang diharapkannya.

Keempat, yang akan kita bangun adalah manusia yang mampu melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas. Maksudnya, ketika dia melihat sesuatu, tidak dipandanginya sebagai sesuatu yang mati. Tetapi harus dianggap sebagai sesuatu yang dinamis, sehingga dia bisa mengembangkan ide, mencari solusi dan jalan keluarnya. Dengan demikian, pada gilirannya nanti, dia akan mampu mencari sesuatu yang akan memberikan nilai tambah dari apa yang dihadapinya pada saat itu.

Tantangan

Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia ada sistem tersendiri yang disebut sebagai *Human Development Index (HDI)*. Setelah krisis mendera pada tahun 2000 yang lalu, HDI kita hanya pada urutan ke 109 saja.

Sementara Vietnam pada posisi 108. Jadi di negara ASEAN sekalipun kualitas SDM kita termasuk pada tingkat yang rendah. "Ini adalah yang menjadi tantangan kita karena kualitas

POTENSI

- BERBUDI PEKERTI LUHUR
- RAJIN DAN TEKUN
- MAMPU BEKERJASAMA
- BERSIFAT PEMBAHARU

CATUR GATRA

sumberdaya manusia kita masih tergolong rendah”, keluh Sinis Munandar.

Bagaimana tidak, secara umum pendidikan formal kita pun kualitasnya masih belum mantap. Bersamaan dengan itu tingkat kreativitasnya juga masih tergolong rendah. Oleh karena itu kita harus mengambil langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dengan sesegera mungkin dan secara menyeluruh, mulai dari tataran kebijakan sampai kepada tataran operasional.

Kemudian Sekolah Pembangunan Pertanian, antara lain SPP Sare di Aceh, SPP Padang, SPP Manokwari, SPP Plaihari dan Banjar, SPP Sembawa dan SPP di Nusa Tenggara Timur akan ditingkatkan menjadi Akademi.

“Jadi nantinya tamatan dari Akademi akan menghasilkan tenaga terampil, sedangkan tamatan dari Sekolah Tinggi akan menghasilkan tenaga ahli”, ujar Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian.

Diklat

Kemudian, di lingkungan Badan Pengembangan SDM Pertanian terdapat kelembagaan pendidikan dan pelatihan pertanian. Kelembagaan pendidikan dan pelatihan ke depan akan ditata berdasarkan bobot tugas dan fungsinya, sehingga nantinya paling tidak akan terdiri dari tiga

Yang akan kita bangun adalah manusia yang mampu melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas.

kualifikasi.

Pertama kelembagaan pendidikan dan pelatihan dengan bobot tugas, fungsi dan ruang lingkup lokal, akan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kedua, kelembagaan pendidikan dan pelatihan dengan bobot tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup kegiatan nasional, akan menjadi kewenangan pusat.

Ketiga, kelembagaan pendidikan dan pelatihan dengan tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup kegiatan regional, bahkan internasional, akan menjadi kewenangan pusat.

Beberapa lokasi lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi daerah sudah ada yang diserahkan pada pemerintah daerah. Namun pengalaman belakangan ini ternyata daerah belum siap untuk menerima tugas pokok dan fungsi tersebut, sehingga meminta kepada pemerintah pusat untuk tetap membinanya. Dengan demikian oleh daerah yang bersangkutan diserahkan kembali ke pusat.

Kelembagaan pendidikan dan pelatihan yang dimungkinkan untuk menangani peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan substansi berskala nasional, akan ditingkatkan menjadi kelembagaan tingkat nasional, sehingga nantinya setara dengan unit kerja struktural eselon dua dengan nomenklatur sebagai “Pusat”.

Paling tidak terdapat empat lokasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dapat ditingkatkan menjadi kelembagaan pusat. Balai Diklat Pertanian di Batu, Malang dapat dikembangkan menjadi kelembagaan yang sifatnya nasional untuk menangani bidang kesehatan hewan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian di Cinagara untuk menangani bidang kesehatan hewan, Balai Pendidikan dan Pelatihan di Kayu Ambon,

Lembang diarahkan untuk menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Hortikultura. Sementara Balai Diklat Pertanian di Sulawesi Selatan akan dikembangkan sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Alat dan Mesin Pertanian.

Kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan yang berlokasi di Ciawi, Bogor, sekarang telah berhasil ditingkatkan, sehingga statusnya menjadi Unit Kerja Eselon II dengan predikat sebagai "Pusat". Namun demikian mengingat tuntutan dan tantangan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga mempunyai cakupan yang bersifat regional dan internasional. Kelembagaan ini nantinya akan menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Sumberdaya Manusia

Philipina mempunyai IRRI yang bertaraf internasional, maka kelembagaan di Ciawi diharapkan berkembang menjadi kelembagaan diklat pertanian yang berskala internasional

Pertanian yang bersifat regional dan internasional. "Hal ini sangat penting, selain secara substansial diperlukan, juga dapat menjadi kebanggaan kita", ujar Sinis Munandar.

Karena, lanjut Sinis, kalau Philipina mempunyai International Rice Research Institute (IRRI), Thailand juga memiliki kelembagaan penelitian yang bertaraf internasional, maka kita mengharapkan Kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian yang di Ciawi yang dapat dikembangkan menjadi kelembagaan diklat di

bidang manajemen pertanian yang berskala internasional.

Program, Personal dan Biaya

Mengenai program, Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian menegaskan bahwa kalau suatu kelembagaan sudah tertata dengan jelas, maka program-programnya juga perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi. Untuk itu, telah disusun *grand design* dan lain sebagainya seperti telah diuraikan di atas.

Kemudian jika kelembagaan telah ditata dan programnya sudah jelas, maka perlu dilengkapi oleh personil yang handal dan profesional. "Kemampuan personil perlu ditingkatkan sehingga menjadi

MEMBANGUN SISTEM USAHA AGRIBISNIS YANG BERDAYA SAING, BERKERAKYATAN, BERKELANJUTAN dan DESENTRALISTIK



sumberdaya manusia yang handal dan profesional, dengan pendidikan dan pelatihan yang sifatnya substantif.”

Penataan aspek kelembagaan, program dan personil perlu dibarengi dengan aspek pembiayaan. Karena tanpa adanya biaya yang memadai, sasaran dan target yang dicanangkan akan sulit untuk dicapai. Tentang aspek pembiayaan ini, Sinis Munandar mengemukakan bahwa dapat ditangani melalui beberapa sumber. Diantara melalui peran pemerintah, yakni dengan APBD atau APBN. Dapat pula dikembangkan melalui bantuan kelembagaan internasional atau negara sahabat, baik sebagai *loan* maupun *grand* ataupun melalui kerjasama dengan

kalangan pengusaha swasta dalam mekanisme kerjasama operasional yang saling menguntungkan.

Apa yang dipaparkan ini semua adalah suatu program besar dalam pembangunan, yakni program pembangunan pertanian yang dasarnya ingin mengembangkan sistem dan perusahaan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berkerakyatan, berkesinambungan dan terdesentralisasi.

Alhamdulillah beberapa hal yang kita lakukan sudah menampakkan hasil. Walaupun demikian, karena waktunya relatif masih pendek, mudah-mudahan di masa mendatang akan lebih berkembang lagi,” demikian Sinis Munandar. (As)



Ir. Moch. Anas Rasyid, MEd.

Dalam Pengembangan SDM Pertanian

Sangat Diperlukan Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Upaya mewujudkan kemandirian petani-nelayan agar dapat menolong dirinya sendiri masih jauh dari harapan, bagaimana sebenarnya kinerja Penyuluhan Pertanian Indonesia?

Berbagai masukan dari pihak yang memberikan penilaian terhadap kinerja penyuluhan pertanian ternyata cukup beragam, antara lain :

- a. Ameer (1994) staf Senior Bank Dunia (The World Bank) melihat permasalahan penyuluhan pertanian di Indonesia terletak pada *tidak adanya strategi* penyuluhan pertanian yang jelas. Selanjutnya dikatakan bahwa memiliki strategi berarti ada rencana intervensi yang disusun secara kronologis dan secara matang serta dapat diantisipasi bagaimana pelaksanaannya dan kemungkinan perubahannya seiring dengan berubahnya waktu.
- b. Studi Center for Advance Training and Rural Development (Catad) of the Humboldt University Berlin (1997) menemukan belum optimalnya peranan penyuluhan pertanian khususnya di tingkat lapang disebabkan oleh *rendahnya tingkat partisipasi* petani dalam penyuluhan pertanian sebagai akibat dari *rendahnya mutu pelayanan pe-*

ERA otonomi dengan prinsip-prinsip desentralisasi membuka peluang penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah pihak lain dalam bentuk organisasi yang berbeda disesuaikan kondisi, tantangan dan peluang masing-masing daerah.

Tantangannya adalah bagaimana kita dapat mengadaptasi nilai-nilai universal penyuluhan pertanian ke dalam suasana lokal, untuk mewujudkan sistem penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien.

Untuk mengetahui lebih jauh berikut ini adalah hasil wawancara penyunting majalah ekstensia dengan Ir. Moch Anas Rasyid, M.Ed. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian sebagai berikut :

nyuluhan pertanian. Disamping itu juga disebabkan oleh lemah dan tidak sistematisnya dukungan pendanaan, sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja Penyuluh Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- c. SP Bimas (1988) mengidentifikasi permasalahan penyuluhan pertanian ada 4 (empat) faktor utama, yaitu :
 - (1). Kelompok tani-nelayan kurang terbina dengan baik;
 - (2). BIPP belum berfungsi sesuai dengan yang diharapkan;
 - (3). BPP belum berfungsi dan;
 - (4). Penyuluh Pertanian belum menjalankan peranannya secara optimal.
- d. Hermawan Soewardi (2001) dalam tanggapannya terhadap pembangunan pertanian dan penyuluhan pertanian menyatakan bahwa penyuluhan pertanian dalam Bimas baru berhasil merubah *behavior* untuk melaksanakan *new practices* atau belum bisa meningkatkan *N-Ach* (*Need for Achievement*), sehingga penyuluhan pertanian perlu diperkuat untuk meningkatkan *personality* dan *achievement oriented*;
- e. Kasus penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Sulsel, belum optimal, dengan gambaran dinamika proses sebagai berikut :
 - (1). IP2TP Makassar

dalam penentuan jadwal dan materi pengkajian masih didasarkan pada program pemerintah cq. Pemerintah Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Renstra, seyogyanya disusun berdasarkan permasalahan spesifik lokalita sesuai kebutuhan petani-nelayan;

- (2). Kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi masih terpisah, sebaiknya disatukan dan kegiatan tersebut secara utuh dilakukan bersama antara peneliti dan penyuluh pertanian;
- (3). Anggaran pengkajian teknologi masih terlalu dominan dibandingkan anggaran diseminasi teknologi, sebaiknya dilakukan secara proporsional;
- (4). Penyuluh pertanian yang bertugas di desa dinilai telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sangat membantu petani-nelayan. Untuk menambah wawasannya para penyuluh pada umumnya memperoleh informasi yang tersaji di berbagai media. Menghadapi permasalahan tersebut di atas maka diperlukan adanya penanganan penyuluhan pertanian yang dilakukan secara sistematis, sehingga upaya pengembangan penyuluhan pertanian di masa mendatang sangat memerlukan pengkajian.

Baru berhasil merubah *behavior* untuk melaksanakan *new practices* atau belum bisa meningkatkan *N-Ach* (*Need for Achievement*)

Pengembangan penyuluhan pertanian dan implementasi desentralisasi di daerah otonomi. Apa saja yang dikaji?

Untuk memperkaya penelaahan penyuluhan pertanian di daerah otonomi berbagai konsep yang perlu diwarnai dengan desentralisasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian Penyuluhan Pertanian
- b. Pengertian Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.
- c. Pemberdayaan Petani-Nelayan.
- d. Penyuluh Pertanian.
- e. Kebijakan Penyuluhan Pertanian.
- f. Desentralisasi dan Sistem Penyuluhan Pertanian.

Sampai dimana penilaian terhadap kondisi kelembagaan dan mekanisme penyuluhan pertanian yang sebenarnya berlaku di kabupaten/kota?

Perubahan struktur organisasi penyuluhan pertanian sangat dibutuhkan, yaitu yang mampu mengakomodasikan berbagai perkembangan dan perlu diberi keleluasaan dalam menerapkan *prinsip dan sistem kerja* sebagai lembaga pendidikan non formal yang sangat mengandalkan *demokratisasi dan partisipasi*. Dalam hal ini dituntut perubahan citra penyelenggara penyuluhan pertanian yang tidak lagi didominasi pemerintah, sehingga diperlukan penanaman pengertian dan pemahaman pemerintah tentang azas, prinsip dan sistem kerja lembaga penyuluhan pertanian.

Perubahan yang mencolok pada kelembagaan dan mekanisme penyuluhan pertanian yang sebenarnya berlaku di kabupaten/ kota sekarang ini adalah pada kelembagaan Balai Informasi dan Pe-

nyuluhan Pertanian (BIPP). Secara rinci perubahan tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

Aspek penting yang perlu dicermati berkaitan dengan terjadinya perubahan tersebut, terutama pada *Status Kelembagaan BIPP* per 30 Juni 2001 menunjukkan data sebagai berikut :

a. Bubar	= 19 buah
b. Belum jelas	= 43 buah
c. Bagian Unit Kerja	= 37 buah
d. Seksi	= 19 buah
e. Subdin	= 53 buah
f. UPTD	= 25 buah
g. Balai/BIPP	= 77 buah
h. Kantor	= 57 buah
i. Badan	= 4 buah

Hal-hal yang perlu dicermati, antara lain :

- a. Aspek fungsi manajemen penyuluhan
- b. Aspek pendayagunaan aset yang dimiliki BIPP.
- c. Aspek pengembangan kinerja.
- d. Aspek pelaksanaan pembinaan.
- e. Aspek kemampuan sumberdaya manusia, terutama yang berkaitan dengan tunjangan fungsional, sarana kerja, biaya operasional dan sistem karier (penilaian angka kredit penyuluh pertanian).

Apa saja kebutuhan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dikaitkan dengan upaya pemberdayaan petani-nelayan?

Kebutuhan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dikaitkan dengan upaya pemberdayaan petani-nelayan dapat

diuraikan sebagai berikut :

- a. Kondisi obyektif petani saat ini sungguh memprihatinkan. Tahun 1993 diperkirakan jumlah petani mencapai 18,7 juta Rumah Tangga (RT) atau 70% dari sekitar 27,3 juta RT pedesaan seluruh Indonesia. Diperkirakan 6 (enam) tahun kemudian jumlah RT petani gurem akan sangat jauh meningkat karena tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan sistem waris yang terjadi secara alamiah. 18,7 juta RT petani itu hanya menguasai 13 % dari luasan lahan pertanian yang ada sedang pemilikan lahan lebih dari 1 Ha menguasai 60% dari total lahan pertanian yang ada.
- b. Kebutuhan teknologi oleh masyarakat

tani masih cenderung pada teknologi tertentu yang diintrodusir oleh pemerintah. Demikian juga halnya dengan pasar, petani-nelayan masih menghadapi pasar yang kurang menguntungkan mereka, posisi tawar yang lemah dan aspek permodalan yang kurang kondusif.

- c. Dalam aspek politik, petani-nelayan masih menghadapi masalah dimana HKTI belum optimal melakukan perjuangan untuk melindungi hak-hak petani. Sementara itu Kelompok KTNA yang baru diformalkan (berbadan hukum) dan lebih mengakar (*grass root*) masih dalam pembenahan ke dalam untuk memposisikan dirinya sebagai organisasi pejuang petani-nelayan yang



Kebutuhan akan teknologi oleh masyarakat tani (Sh)

- mampu membela hak-hak petani-nelayan terhadap perlakuan yang tidak adil dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka.
- d. Pelanggaran terhadap hak-hak petani-nelayan, antara lain hak atas tanah, hak atas air irigasi, perdagangan yang adil, organisasi, memperoleh modal, kebebasan menanam, hak dan kebebasan menggunakan sarana produksi (benih, perlindungan tanaman, pupuk dan alsintan).
- e. Sayogyo (1999) mengatakan ada 3 (tiga) masalah pokok yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yaitu:
- (1). Restrukturisasi kelembagaan dasar komunitas desa;
 - (2). Meninjau kembali kebijakan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - (3). Program agar dirubah dari top down menjadi bottom up.
- f. Sitorus (2000) menyatakan bahwa pendekatan penyuluhan pertanian ke depan, adalah pendekatan sosial yang berorientasi pada peningkatan posisi tawar secara sosial ekonomi, sehingga petani-nelayan mampu menjadi mitra sejajar pemerintah dan pengusaha diatas struktur hubungan subyek-subyek dengan tujuan meningkatkan akses kaum tani terhadap sumber-sumber sosial ekonomi.

Bagaimana kesiapan daerah dalam rangka pengembangan kelembagaan dan mekanisme penyuluhan pertanian dan keberadaan dari penyuluh pertanian?

Dalam rangka pengembangan kelembagaan dan mekanisme penyuluhan pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian dimasa depan sangat diperlukan adanya *undang-undang penyuluhan pertanian*. Undang-undang ini dimaksudkan guna menyiapkan daerah otonom memperkuat kedudukan Lembaga Penyuluhan Pertanian beserta sumberdaya manusia maupun kebijakan yang mengaturnya.

Sementara itu penyuluhan pertanian ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan berupa perubahan lingkungan sosial dan ekonomi yang dinamis, baik di tingkat daerah dan nasional maupun global.

Masyarakat pertanian disiapkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam

Pendekatan penyuluhan pertanian ke depan, yaitu pendekatan sosial yang berorientasi pada peningkatan posisi tawar dalam secara sosial ekonomi, sehingga petani-nelayan mampu menjadi mitra sejajar dengan pemerintah dan pengusaha



Akses kaum tani-nelayan terhadap sumber-sumber sosial ekonomi (Sh)

penerapan pendekatan agribisnis yang berkelanjutan. Untuk itu pengetahuan, keterampilan mereka dalam penerapan teknologi perlu di dukung dengan ketersediaan dan akses terhadap informasi.

Bagaimana sebaiknya kebijakan penyuluhan pertanian ke depan?

Penyuluhan pertanian ke depan dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan sosial dan peningkatan akses kaum tani-nelayan terhadap sumber-sumber sosial ekonomi. Disamping itu juga diperlukan upaya untuk sekaligus meningkatkan integritas

sosial mereka melalui pendekatan potensi kelembagaan masyarakat petani-nelayan yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumberdaya ekonomi lokal, khususnya sumber-sumber agraria.

Penyuluh pertanian ke depan adalah penyuluh pertanian yang dapat menciptakan dirinya sebagai mitra dan fasilitator petani-nelayan dengan melakukan peranan yang sesuai antara lain :

- a. Sebagai penyedia jasa pendidikan;
- b. Sebagai motivator;
- c. Sebagai konsultan;
- d. Sebagai pendamping petani.

Apa saja yang diuraikan dalam desentralisasi dan sistem penyuluh pertanian?

Yang ditata dalam desentralisasi dan sistem penyuluhan pertanian, yaitu:

- a. Sistem yang digerakkan oleh kepemimpinan petani-nelayan;
- b. Sistem yang bertumpu pada kekuatan kerja sama;
- c. Sistem yang bertumpu pada otonomi kabupaten/kota;
- d. Sistem yang berporos pada keterpaduan program yang ber w a w a s a n agribisnis dan kelestarian lingkungan;
- e. Sistem yang diwadahi oleh kesatuan kelembagaan;
- f. Sistem yang dilayani oleh satu kesatuan Korps Penyuluh Pertanian;
- g. Sistem yang didukung oleh profesionalisme Penyuluh Pertanian.

Upaya-upaya pembaharuan apa saja yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian?

Upaya-upaya pembaharuan yang sedang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian adalah sbb :

- a. Reposisi penyuluh pertanian;

- b. Redinamisasi kepemimpinan tani-nelayan;
- c. Restrukturisasi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- d. Reorientasi program/programa penyuluhan pertanian.

Bagaimana Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian menghadapi hal tersebut?

Dalam menghadapi hal-hal tersebut di atas Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian akan terus berupaya untuk melakukan reorientasi, redinamisasi, reposisi, dan revitalisasi penyuluhan pertanian, guna merumuskan ciri-ciri dan arah penyelenggaraan penyuluhan

pertanian yang terdesentralisasi, mengembangkan kinerja penyuluh pertanian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan kelembagaan penyuluhan pertanian dan sumberdaya manusia terus melakukan inovasi, dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. (Sh)

Sistem yang digerakkan oleh kepemimpinan petani-nelayan

Sistem yang dilayani oleh satu kesatuan Korps Penyuluh Pertanian

Perihal : Administrasi Penyuluh Pertanian
Dalam Rangka Otonomi Daerah

18 Mei 2001

SURAT EDARAN

Nomor : KP.440/287/B/V/2001

Kepada Yth.:

1. Gubernur Propinsi
 2. Bupati/Walikota
- di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dimulainya pelaksanaan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan telah diserahkannya personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi (P3D) maka sebagian kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam penanganan administrasi kepegawaian khususnya Penyuluh Pertanian, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Angka Kredit Penyuluh Pertanian

Seperti diketahui kewenangan untuk menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian gol. III sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/KP.150/2/1997 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi, sedangkan gol. II oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota Madya. Dengan dilikuidasinya Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan adanya perubahan struktur organisasi pada Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, maka Pejabat Penetap, Pejabat Pengusul dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian perlu disesuaikan dan ditetapkan/dibentuk sebagai berikut:

1.1. Untuk Tingkat Propinsi

- a). Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian gol. III yang satuan administrasi pangkalnya berada di Dinas-Dinas/Unit Kerja lingkup Pertanian pada Pemerintah Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi;

- b). Pejabat yang berwenang mengajukan usul penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian gol. III adalah Kepala Bagian yang membidangi fungsi administrasi kepegawaian Penyuluh Pertanian pada Pemerintah Daerah Propinsi;
- c). Sedangkan bagi Penyuluh Pertanian gol. IV/a ke atas yang satuan administrasi pangkalnya di Dinas-Dinas/Unit Kerja lingkup Pertanian pada Pemerintah Daerah Propinsi, usul penetapan Angka Kredit disampaikan oleh Sekretaris Daerah Propinsi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian selaku Pejabat Penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian gol. IV/a ke atas;
- d). Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian pada Pemerintah Daerah Propinsi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi dengan susunan sebagai berikut:
 - * Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat setingkat Eselon III yang membidangi fungsi Penyuluhan Pertanian pada Pemerintah Daerah Propinsi atau Penyuluh Pertanian Senior;
 - * Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi fungsi Kepegawaian atau Penyuluh Pertanian Senior;
 - * Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Struktural setingkat Eselon IV pada Pemerintah Daerah Propinsi yang menangani fungsi Kepegawaian/administrasi angka kredit Penyuluh Pertanian;
 - * Sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota yang dijabat oleh Penyuluh Pertanian dengan persyaratan jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan Penyuluh Pertanian yang dinilai, memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Pertanian dan dapat aktif melakukan penilaian.

1.2. Untuk Tingkat Kabupaten/Kota

- a). Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian gol. II dan gol. III yang satuan administrasi pangkalnya berada di Dinas-Dinas/Unit Kerja lingkup Pertanian pada Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota adalah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

- b). Pejabat yang berwenang mengajukan usul penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian gol. II dan gol. III adalah Kepala Bagian yang membidangi fungsi administrasi kepegawaian Penyuluh Pertanian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c). Sedangkan bagi Penyuluh Pertanian gol. IV/a ke atas yang satuan administrasi pangkalnya di Dinas-Dinas/Unit Kerja lingkup Pertanian pada Pemerintah Daerah/Kota. usul penetapan Angka Kredit disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian selaku Pejabat Penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian gol. IV/a ke atas;
- d). Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan susunan sebagai berikut:
 - * Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat setingkat Eselon III yang membidangi fungsi Penyuluhan Pertanian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Penyuluh Pertanian Senior;
 - * Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi fungsi Kepegawaian atau Penyuluh Pertanian Senior;
 - * Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Struktural setingkat Eselon IV pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menangani fungsi Kepegawaian/administrasi angka kredit Penyuluh Pertanian;
 - * Sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota yang dijabat oleh Penyuluh Pertanian dengan persyaratan jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan Penyuluh Pertanian yang dinilai, memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Pertanian dan dapat aktif melakukan penilaian.

2. Administrasi Tenaga Penyuluh Pertanian.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian Penyuluh Pertanian tetap mengacu kepada:

- a. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.
- b. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1039/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor: 179 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.
- c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 41.1/Kpts/OT.210/2/2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.

Untuk lancarnya pengelolaan administrasi kepegawaian Penyuluh Pertanian, diharapkan agar pejabat yang menangani administrasi kepegawaian Penyuluh Pertanian pada masing-masing Satuan Administrasi Pangkal lebih mendalami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam keputusan-keputusan tersebut di atas.

- 2.1. Mengingat bahwa tanggal 30 September 2001 adalah batas waktu terakhir penyesuaian jenjang jabatan Penyuluh Pertanian lama berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 73/MENPAN/1985 ke jenjang jabatan baru berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999, maka terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001 kegiatan Penyuluh Pertanian sudah menggunakan formulir-formulir sesuai contoh formulir yang terdapat pada Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1039/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor: 179 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 41.1/Kpts/OT.210/2/2000.
- 2.2. Selanjutnya dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 96 tahun 2000, kewenangan pengangkatan, kenaikan pangkat, alih status, alih wilayah kerja, pembebasan sementara, pemberhentian dan mutasi

lain-lain dengan diserahkannya P3D instansi vertikal lingkup Departemen Pertanian kepada Pemerintah Daerah menjadi wewenang Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Namun untuk periode kenaikan pangkat 1 April 2001, sesuai Surat Kepala BKN Nomor: K.26-1/V.1-2/1999 tanggal 3 Januari 2001, masih ditangani Pusat, sedangkan selanjutnya sesuai surat Kepala BKN Nomor: K.26-12/V.6-60/1999 tanggal 12 April 2001 akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- 2.3. Selain itu perlu kami sampaikan, agar kegiatan penyuluhan pertanian tetap berjalan seperti selama ini, semua Penyuluh Pertanian yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah tetap ditempatkan pada tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan pertanian. Hal ini sejalan dengan maksud surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 800/2365/SJ tanggal 9 Oktober 2000 yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

3. Alih Status Dari dan Ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian melalui alih status dari jabatan Struktural atau jabatan Fungsional lain dapat dipertimbangkan sepanjang masih dibutuhkan guna kelancaran tugas-tugas kegiatan penyuluhan pertanian oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan-keputusan tersebut pada butir 2 di atas. Proses pengangkatan dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dapat melalui pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Pertanian.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang baru pertama kali diangkat dalam jabatan Penyuluh Pertanian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

3.1. Pengangkatan Pertama

- a. Berijazah serendah-rendahnya D.III bidang pertanian, berpangkat Pengatur Muda Tk. I gol/ruang II/b bagi Penyuluh Pertanian Terampil, atau Sarjana (S1) bidang pertanian berpangkat Penata Muda gol/ruang III/a bagi Penyuluh Pertanian Ahli.
- b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang penyuluhan pertanian dan memperoleh sertifikat tanda lulus.
- c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan pertanian pada

unit kerja yang mempunyai fungsi penyuluhan pertanian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.

- d. Berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- e. Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Bagi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diseleksi oleh Komisi Penguji Jabatan Penyuluh Pertanian yang dibentuk di Tingkat Propinsi oleh Gubernur dan di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota. Seleksi yang dilakukan oleh Komisi Penguji Jabatan Penyuluh Pertanian meliputi seleksi administrasi, tes psikologi (kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, prestasi), serta tes akademik/pengetahuan. Untuk itu agar Saudara dapat membentuk Komisi Penguji Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang anggotanya terdiri dari pejabat yang menangani fungsi administrasi, pakar dibidang penyuluhan pertanian, psikolog (apabila perlu), serta Penyuluh Pertanian Senior.

3.2. Pengangkatan Kembali

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dilakukan apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani pembebasan sementara karena:

- a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penyuluh Pertanian (misal: menjabat struktural, menjadi konsultan dan lain-lain);
- b. tugas belajar lebih dari 6 bulan;
- c. dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman sedang atau berat berupa hukuman disiplin penurunan pangkat;
- d. Cuti di luar tanggungan Negara.

Pengajuan permohonan untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan selesai dari pembebasan sementara.

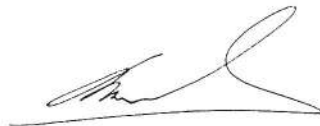
4. Tenaga Honorar

Mengingat masih banyaknya tenaga honorar Penyuluh Pertanian, diharapkan agar daerah dapat mengupayakan formasinya untuk dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 98 tahun 2000.

5. Untuk hal-hal dimaksud pada butir 1 s/d 4 di atas, diharapkan bantuan Saudara agar dapat memberitahukan kepada Pimpinan Unit Kerja yang menangani administrasi kepegawaian Penyuluh Pertanian. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi hambatan dalam proses kepegawaian Penyuluh Pertanian yang bersangkutan.

Demikian agar Saudara menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Ir. Nelson P. Hutabarat, MBA
NIP. 080.018.687

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Pimpinan Unit Eselon I lingkup Departemen Pertanian.

Sebatas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini biasa saja. Kegiatan-kegiatan yang diciptakannya tak lebih dari simpan pinjam dan tak beda dengan kegiatan kelembagaan ekonomi seperti bank pada umumnya. Transformasi (perubahan) petani-nelayan kecil (PNK) menjadi LKM, jika dipandang sebatas seperti itu menjadi hal yang tak luar biasa. Lalu dimana letak keunggulannya?

Dalam menggerakkan perekonomian pedesaan yang dicirikan dengan peningkatan pendapatan, nilai tambah atas faktor produksi, proses pemberdayaan kelompok tani bisa dipandang sebagai proses percepatan transformasi ke arah terbentuknya kelompok yang responsif terhadap dinamika perubahan yang memiliki keunggulan dalam melakukan



LKM membangun keswadayaan dan kemandirian petani-nelayan (Aa)

Lembaga Keuangan Mikro

Suatu Transformasi Sosial Petani-Nelayan Kecil menjadi Unit Ekonomi di Pedesaan



"Jimpitan beras" sebagai salah satu cara pengumpulan modal kelompok tani (Aa)



Kapital (modal) sebagai input fisik dalam sistem usahatani (Aa)

penyesuaian diri untuk menunjukkan kemandirian daya saingnya di bidang ekonomi, biasanya didasarkan pada visi ekonomi yang jelas dan tanpa dicampuri oleh kepentingan sempit dan sesaat.

Dalam kerangka itu, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil) berupaya untuk memberdayakan PNK agar mampu membebaskan diri dari lingkaran kemiskinan dengan misi pendidikan yang secara sistematis membangun keswadayaan dan kemandirian PNK dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengelolaan usahanya secara rasional. Salah satu kinerja P4K yang menarik adalah membangun PNK menjadi LKM.

Yang sangat disadari sejak awal oleh P4K adalah merancang unsur modal dalam sistem pembelajaran PNK, sehingga PNK yang memang di bawah garis kemiskinan ini dibekali kekuatan dalam hal penyediaan modal untuk merencanakan

usaha yang dipilihnya nanti. Walaupun kapital (modal) sebagai input fisik dalam sistem usaha dapat dipandang hanya sebagai aspek indikatif dari pada sebagai faktor pembangkit daya saing kelompok, sebab yang dikembangkan kemudian sesuai misi proyek ini adalah membangun perubahan perilaku PNK itu sendiri.

Ini ditunjukkan dengan perubahan PNK menjadi LKM, bukan hanya menunjukkan perubahan

fisik dari kecil menjadi besar semata. Jika dicermati lebih jauh, minimal ada dua keunggulan yang menjadi ciri khas LKM yang tumbuh dari PNK, yaitu (1) proses perubahan tumbuhnya PNK menjadi LKM, dan (2) keterwakilan PNK dalam kelembagaan ini.

Menggeliatnya PNK menjadi LKM memang suatu proses perubahan tumbuhnya PNK yang beranjak dari kecil menjadi besar, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tak bisa menjadi bisa.

Secara ringkas, mula-mula PNK ini didampingi bergabung dalam kelompok Petani-nelayan Kecil (KPK), kemudian pada tahap berikutnya dikembangkan menjadi Gabungan KPK. Untuk mendukung usahanya para PNK yang tergabung menjadi KPK, mendapat pinjaman modal usaha dari BRI, sekaligus secara bertahap dibimbing untuk melakukan kebiasaan menabung, mula-mula hanya tabungan wajib sebagai prasyarat

memperoleh pinjaman yang kemudian berkembang menjadi tabungan kelompok. Fenomena yang menarik di beberapa tempat tabungan kelompok ini dikembangkan menjadi kegiatan simpan pinjam.

Beberapa Gabungan KPK kemudian mengembangkan kegiatan simpan pinjamnya ini menjadi LKM, yang dapat membantu penyediaan modal usaha dan sebagai sumber pengembangan usaha para anggotanya. Gambaran kinerja beberapa Gabungan KPK yang telah berkembang menjadi LKM berdasarkan data lapangan pada Proyek P4K, antara lain sebagai berikut:

1. LKM Tani Makmur, Kecamatan Geyer, Kab. Grobogan

LKM ini berdiri tahun 2000 yang beralamat di Desa Geyer, Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. KPK yang bergabung sebanyak 27 KPK dengan jumlah anggota perorangan sebanyak 313 orang yang terdiri dari 243 orang wanita dan 92 orang pria. Jumlah kekayaan Gabungan KPK/LKM sebanyak Rp. 22.753.600,- yang terdiri dari tabungan di Bank sebanyak Rp. 2.060.000,-, pinjaman yang diberikan pada anggota

sebanyak Rp.20.693.600,-, simpanan (pokok, wajib, dan sukarela) sebanyak Rp. 6.385.000, dan hibah dari pihak ketiga sebanyak Rp. 700.000.

Pelayanan LKM pada anggotanya dilakukan secara harian. Bunga pinjaman 2%/bulan ditambah biaya administrasi 1 % dari total pinjaman. Jangka waktu pinjaman paling pendek 12 minggu paling lama 10 bulan. Besar pinjaman maksimal Rp. 100.000/orang. Sistem angsuran tergantung pilihan anggota (harian, mingguan, dan bulanan).

2. LKM Bangunsari, Kecamatan Toroh, Kab. Grobogan

LKM ini berdiri pada tahun 1993 yang beralamat di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. KPK yang bergabung sebanyak 13 KPK dengan anggota perorangan sebanyak 130 orang



Tabungan kelompok yang kemudian dikembangkan menjadi kegiatan simpan pinjam (Aa)



Arisan uang merupakan salah satu cara membangun perubahan perilaku petani-nelayan kecil (Aa)

terdiri wanita sebanyak 70 orang dan pria sebanyak 60 orang. Jumlah kekayaan Gabungan KPK/LKM ini sebanyak Rp. 11.405.450,-, LKM ini telah berhasil meminjamkan dananya kepada anggota sebanyak Rp. 81.680.540,-. Gabungan KPK/LKM ini telah mampu memupuk modal dari anggota sebanyak Rp. 12.256.200,- dan mendapat hibah dari pihak ketiga sebanyak Rp. 59.000.000.

Pelayanan yang diberikan kepada anggotanya dilakukan mingguan. Jangka waktu pinjaman harian, mingguan, dan tergantung permintaan. Besar pinjaman maksimum sebesar Rp. 1.500.000,- dengan besarnya bunga 2,5% /bulan ditambah biaya administrasi sebesar 1% dari total pinjaman.

3. LKM Karya Terpadu-Terara Lombok Timur

LKM ini berdiri tahun 1993 yang beralamat di Desa Rarang, Kecamatan Terara Kab.Lombok Timur. KPK yang bergabung sebanyak 42 KPK, dengan jumlah anggota perorangan sebanyak 557 orang yang terdiri dari 36 pria dan 521 orang perempuan. Jumlah kekayaan Gabungan KPK/LKM ini sebanyak Rp.143.878.642,-, secara kumulatif LKM ini telah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp 152.425.880,-. Gabungan KPK/LKM ini telah mampu memupuk modal sebanyak Rp. 102.774.500,- dan mendapat hibah dari pihak ketiga sebesar Rp. 24.571.500,-. Pelayanan yang diberikan kepada anggota harian. Jangka waktu pinjaman 12 minggu hingga 5 bulan. Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 4.000.00,-, bunga pinjaman berkisar antara 1/5 s/d 3% /bulan ditambah biaya administrasi 1% dari total

pinjaman.

Kerjasama yang telah dijalin oleh LKM ini antara lain dengan BKKK berupa penyaluran kredit, dengan PLN berupa bantuan dana bergulir, dengan PT. Krida Yamaha berupa kerjasama dalam rangka kredit Motor Yamaha, dengan Sucofindo berupa bantuan dana bergulir dan dengan Kapolres dalam rangka pembuatan SIM.

4. LKM Tunas Harapan-Pijut, Lombok Tengah

LKM ini berdiri tahun 1994 yang beralamat di Pijut-Lombok Tengah, NTB. KPK yang bergabung dalam LKM berjumlah 16 KPK dengan jumlah anggota perorangan sebanyak 207 orang yang terdiri dari 60 anggota pria dan 147 orang perempuan. Jumlah kekayaan Gabungan KPK/LKM ini sebanyak Rp. 156.755.562,-. Secara kumulatif LKM ini telah berhasil menyalurkan kredit kepada anggotanya sebanyak Rp. 33.100.000,-. Gabungan KPK/LKM ini telah mampu memupuk modal dari anggota berupa **s i m p a n a n pokok, wajib, dan sukarela** sebanyak Rp. 8.893.000,- dan mendapat hibah dari pihak ketiga sebanyak Rp. 2.000.00,-.

P e l a y a n a n kepada anggota dilakukan secara hari-

an. Bunga pinjaman sebesar 2%/bulan ditambah dengan biaya administrasi 4% dari total pinjaman. Besar pinjaman maksimum Rp. 1.000.000,-. Kerjasama yang dijalin oleh LKM ini antara lain : dengan Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) dalam rangka supply minyak tanah, dengan BPD Praya dalam rangka pengembangan dengan BRI Cabang Praya dalam rangka penyaluran kredit KPK, dengan PLN Cabang Matraman dalam rangka dana bergulir, dengan Dinas Koperasi Kab. Lombok Tengah berupa penyaluran dana subsidi BBM.

5. LKM Usaha Bersama, Kec. Geneng, Ngawi

Gabungan KPK/LKM ini berdiri tahun 1992 yang beralamat di Desa Kasereman. Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Jumlah KPK yang bergabung sebanyak 13 KPK dengan total anggota perorangan sebanyak 146 orang yang terdiri dari 92 pria dan 54 orang wanita. Jumlah kekayaan Gabungan KPK/LKM ini berjumlah Rp. 94.333.335,-. Secara akumulatif LKM ini telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp. 213.043.900,-.

A d a p u n pemupukan modal

Sepintas LKM ini biasa saja. Kegiatan-kegiatan yang diciptakannya tak lebih dari simpan pinjam dan tak beda dengan kegiatan kelembagaan ekonomi seperti Bank pada umumnya.

dari anggota sebanyak Rp. 13.214.355,- sementara hibah dari pihak ketiga sebesar Rp. 59.000.000,- Pelayanan kepada anggota dilakukan secara harian. Bunga pinjaman sebanyak 2% ditambah biaya administrasi 2% dari total pinjaman. Besar pinjaman maksimum Rp 1.500.000,-.

Kerjasama yang berhasil dijalin oleh LKM ini antara lain dengan : Dinas Sosial berupa bantuan Las Listrik, dengan Dinas Koperasi berupa bantuan modal dalam rangka LEPMM; dengan KUD dalam rangka pengadaan pupuk, listrik dan KUT dengan swasta dalam rangka pengadaan Saprotan.

Dinamika pemberdayaan kelompok tani dapat ditunjukkan oleh adanya perubahan orientasi kegiatan ekonomi yang dijalankan. Pada kelompok tani yang relatif masih muda atau baru lahir, gambaran orientasinya kegiatan ekonominya cenderung berciri tradisional subsisten yang tidak tanggap kehidupan yang lebih baik, pada kelompok tani yang lebih maju seperti yang ditunjukkan oleh beberapa LKM ini kelompok telah merespon ke arah perubahan hidup yang lebih baik dan juga tanggap terhadap perubahan dunia luar, mereka cenderung berkembang ke arah yang mencirikan usaha pertanian lebih komersial.

Munculnya gejala, dimana petani sebagai buruh di pedesaan mempunyai makna sebagai sub ordinasi dari para pemilik modal/uang, lahan dari luar desa. Jika dipahami lebih dalam kondisi ini hampir tidak ada hubungannya dengan pengembangan atau pemberdayaan kelompok tani sebagai unit ekonomi di pedesaan. Yang justru sangat dirasakan

adalah bahwa kelompok tani menjadi semacam alat untuk melakukan eksploitasi terhadap petani secara lebih sistematis.

Kondisi ini tidak terjadi di LKM yang tumbuh dari PNK, secara sistematis P4K telah mengembangkan penumbuhan kelompok dengan prinsip keterwakilan (demokratisasi) yang kuat dari mereka sendiri. Jadi LKM ditumbuhkan dari, oleh dan untuk mereka sendiri, tegasnya tidak ada makhluk asing yang ada di LKM yang tumbuh dari PNK ini.

Kekuatan suatu masyarakat adalah pada peradabannya. Beberapa ciri kelompok yang berdaya saing tinggi sebagai basis ekonomi di pedesaan yang menonjol pada LKM ini adalah adanya kompetensi SDM sebagai pelaku bisnis yang andal, sistem manajemen yang cerdas dan sehat, kepemimpinan yang kuat (visioner, inspiratif, berketerampilan dan berjiwa altruistik), memiliki landasan tata nilai ekonomi yang akrab dengan kemajuan.

Walaupun kapital (modal) sebagai input fisik dapat dipandang sebagai aspek indikatif dari pada sebagai faktor pembangkit daya saing kelompok. Dengan tumbuhnya LKM ini diharapkan kelompok memiliki daya saing seperti penciri di atas dan memiliki kemampuan menyerap input usaha (termasuk modal) yang relatif lebih tinggi untuk pengembangan usahanya.

Dengan dua keunggulan di atas, di masa depan rasanya PNK ini dapat lebih siap dengan kemandiriannya menjadi unit ekonomi di pedesaan yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi penetrasi pasar global. (Aa)



KIPP Kabupaten Indramayu (As)

Dibayangi Banyak Permasalahan

Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Indramayu Masih *Eksis*

DARI sekian banyak institusi penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten di seluruh Indonesia, di Kabupaten Indramayu termasuk salah satu yang eksistensinya dipertahankan Pemerintah Daerah setempat. Keberhasilan ini selain merupakan kepedulian dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, tentu merupakan prestasi tersendiri bagi para praktisi penyuluhan di kabupaten paling utara Jawa Barat ini.

Setelah ditelusuri, ternyata tidak semudah dibayangkan untuk mempertahankan kelembagaan yang satu ini. Karena untuk sampai pada kesimpulan mengubah nama Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian menjadi Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian telah

melalui perjalanan yang melelahkan.

Untuk meyakinkan para petinggi di daerah ini, tampaknya para penyuluh pertanian yang dimotori oleh jajaran BIPP, Kontaktani, Kelompoktani dan Jajaran Instansi terkait lainnya melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan Pemda setempat. Karenanya, kemudian membentuk semacam Tim sukses yang tugasnya selain menggalang kesatuan dan persatuan diantara penyuluh dan petani, juga berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya keberadaan instansi penyuluhan di Kabupaten Indramayu.

Menurut Drs. H. Raskim Dwi Putra, SmHk, Kepala Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu, langkah pertama yang dilakukan Tim

Sukses, adalah berupaya untuk meyakinkan semua kalangan bahwa Program Pembangunan Pertanian saat ini diarahkan terhadap program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Agribisnis, yang merupakan tanggungjawab bersama untuk disukseskan. Tentu saja termasuk di Kabupaten Indramayu.

Dijelaskan pula bahwa pada dasarnya melaksanakan pembangunan pertanian adalah masyarakat tani, petani-nelayan beserta keluarganya, termasuk pula para pengusaha di sektor pertanian dan lembaga lain yang terkait dalam bidang pertanian. Mereka itu adalah merupakan sasaran dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian baik sekarang maupun yang akan datang.

Sebagai bahan pertimbangan betapa pentingnya penyuluhan pertanian digambarkan beban tugas pembinaan pada petani yang demikian besar, diantaranya dilihat dari segi fisik. Kabupaten Indramayu yang mempunyai potensi sawah seluas 115.531 Ha. Dan tanah darat 85.498 Ha, yang merupakan gantungan hidup sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian yang selalu membutuhkan bimbingan dari para penyuluh pertanian.

Pada sisi lain penyuluhan pertanian adalah pendidikan non formal bagi petani-nelayan beserta keluarganya dalam arti luas yang berada di pedesaan. Agar penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik (efektif dan efisien) diperlukan kemantapan kedudukan, tugas dan fungsinya.

Dengan demikian, keberadaan dan peran penyuluhan sangat penting dalam mensosialisasikan program pembangunan pertanian, terutama untuk membantu



Drs. H. Raskim Dwi Putra (As)

memecahkan masalah yang dihadapi petani-nelayan sehingga terwujudnya masyarakat tani-nelayan yang tangguh mandiri dan profesional yang berwawasan agribisnis dengan memperhatikan terpeliharanya kelestarian lingkungan.

Selain daripada itu, diketengahkan pula keterkaitan dengan kebijaksanaan daerah yakni sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Indramayu dimana di dalam salah satu misinya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memegang peranan sangat penting dalam pembangunan. Visi dan misi ini akan dapat diwujudkan dengan keberadaan institusi penyuluhan yang salah satu tugas dan fungsinya adalah salah satu tugas dan fungsinya adalah menangani masalah sumberdaya manusia pertanian.

Mengingat potensi sumberdaya alam cukup melimpah tanpa diimbangi dengan

peningkatan kualitas SDM niscaya pembangunan tidak akan cepat maju. Apalagi dihadapkan dengan memasuki era globalisasi perdagangan bebas. Kita akan dituntut untuk bersaing ketat antar negara lain terutama bersaing dalam memasarkan produk-produk unggulan pertanian kita.

Maka bertitik tolak dari pemikiran tersebut di atas, sekaligus dalam rangka pemberdayaan petani-nelayan agar mandiri, tangguh dan profesional, maka kelembagaan penyuluhan pertanian mutlak diperlukan. Bersamaan dengan itu jajaran Penyuluh Pertanian dituntut untuk lebih profesional yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang semakin kompleks dimasa mendatang.

Dalam keadaan demikian sebagai lembaga profesional, sebaiknya lembaga penyuluhan pertanian berdiri sendiri (Mandiri) di tingkat Kabupaten/Kota," demikian salah satu kesimpulan yang digelar pada setiap kesempatan melakukan ekspose Tim Sukses ke berbagai pihak. Dan akhirnya, Pemerintah Daerah Indramayu dengan pengertian yang mendalam meluluskan kehendak para penyuluh pertanian, instansi terkait, petani dan seluruh jajarannya, sehingga eksistensi penyuluhan pertanian dapat dipertahankan dengan institusi Kantor

Informasi dan Penyuluhan Pertanian.

Tantangan

Kendati telah berhasil mempertahankan eksistensi kelembagaan dan wahana penyuluhan di Kabupaten ini, ternyata masih belum lepas dari berbagai persoalan, diantaranya berbagai pengalaman pahit yang disandang oleh para Penyuluh Pertanian selalu mengalami bongkar pasang unit kerjanya (selama ini sudah 4 kali bongkar pasang) lebih-lebih setelah adanya perubahan kebijakan pemerintah yaitu diberlakukannya keputusan Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 539/Kpts/LP.120/7/1991 dan Nomor: 65 Tahun 1991 tentang penempatan penyuluh pertanian pada dinas-dinas lingkup pertanian di Kabupaten, yang tersebar dengan adanya penyuluh perkotakotak.

Permasalahan tersebut menyebabkan timbulnya stagnasi pada penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah. Kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat BPP/Kecamatan secara umum tidak berfungsi, etos kerja penyuluh pertanian menjadi sangat menurun, timbul kelesuan, kelelahan, kurang gairah dan kebijakan ini tentunya akan merugikan pemerintah sendiri karena akan berpengaruh terhadap tingkat kualitas pemberdayaan masya-

Dalam keadaan demikian sebagai lembaga profesional, sebaiknya lembaga penyuluhan pertanian berdiri sendiri di tingkat Kabupaten/Kota.

rakat tani-nelayan.

Selanjutnya timbulnya BIPP yang merupakan implementasi dari Keputusan Bersama Mendagri Nomor: 54 Tahun 1996 dan Nomor: 301/Kpts/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, banyak pendapat dan dirasakan oleh penyuluh pertanian kami sendiri dikatakan merupakan kebangkitan kembali penyuluhan pertanian dimana berfungsinya kembali BPP, tumbuhnya kembali semangat penyuluh pertanian dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dalam hal ini sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi masyarakat tani-nelayan di Kabupaten Indramayu, sehingga BIPP dianggap dan merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian yang paling tepat ditingkat Kabupaten.

Namun dalam perjalanannya, dimana BIPP sedang memulai mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Kinerjanya) digoyahkan kembali oleh adanya Surat Menteri Pertanian yang ditujukan pada Gubernur dan Bupati, dengan Surat Menteri Pertanian Nomor OT.210/96/Mentan/IV/2000, tertanggal 27 April 2000 tentang penataan kelembagaan pertanian disusul otonomi Kabupaten/Kota yang isinya adanya perubahan kelembagaan dan manajemen penyuluhan pertanian, yang disingkirkan akan menurunkan kinerja

penyuluh pertanian di Kabupaten Indramayu.

Menyadari terjadinya tragedi tersebut dan peranan penyuluhan pertanian sangat penting dalam mensukseskan pembangunan pertanian, maka dalam rangka memasuki otonomi daerah Tingkat Kabupaten/Kota dipandang sangat penting BIPP sebagai wadah organisasi penyuluhan pertanian perlu dipertahankan tetapi bentuknya saja disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini mengingat di Kabupaten Indramayu dalam Rencana Penataan Perangkat Daerah terdapat 2 (dua) Dinas Lingkup Departemen Pertanian dalam arti luas yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Dengan usaha yang keras dan pengertian dari pemerintah daerah setempat, maka eksistensi Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian

masih dapat dipertahankan menjadi Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian. Tampaknya, kendati eksistensi dapat dipertahankan, mengingat potensi sektor pertanian yang demikian besar, maka kelembagaan yang menampung wadah kegiatan profesi penyuluh pertanian masih belum sebanding dengan beban tugasnya, Kendati begitu, untuk saat ini mungkin cukuplah demikian dulu. (As)

Dengan usaha yang keras dan pengertian dari pemerintah daerah setempat, maka eksistensi Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian masih dapat dipertahankan.



KIPPK Kabupaten Barito Selatan (Dt/Sb)

Barito Selatan

Mempertahankan Eksistensi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

DI tengah-tengah *euphoria* kebebasan pada era otonomi. Beberapa daerah dalam mengurus kewenangan penyuluhan pertanian terkesan masih belum dapat mengadopsi paradigma baru pembangunan, masih asyik dengan paradigma lamanya menggunakan pendekatan instruktif atau pendekatan dari atas (*top down*) dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Padahal penyuluhan pertanian sejak tahun 1996 melalui SKB Mendagri dan Mentan telah merintis pendekatan dari bawah (*bottom up*), yaitu mengupayakan agar BPP dapat dikelola oleh petani dengan menyusun dan melaksanakan Programa Penyuluhan Pertanian



Serah terima jabatan Kepala KIPPK dari Ir. Wasriady kepada Ir. Eskop (Dt/Sb)

yang partisipatif bersama-sama dengan para Penyuluh Pertanian.

Eksistensi BIPP di tingkat Kabupaten/Kota pada era otonomi sekarang ini masih perlu dipertahankan, walaupun dalam perkembangannya terpaksa harus merubah namanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, asalkan tugas dan fungsinya tetap sebagai kelembagaan fungsional Penyuluhan Pertanian, sebagai wahana pembinaan BPP serta sebagai wahana mengembangkan profesionalisme Penyuluh Pertanian, atau lebih populer sebagai markasnya para Penyuluh Pertanian dalam merealisasikan peranannya sebagai mitranya petani.

Para penyelenggara penyuluhan pertanian khususnya Penyuluh Pertanian di Bumi Dahani Dahanai Tuntang Tulus yaitu di Kabupaten Barito Selatan pada era otonomi sekarang ini boleh berlega hati, karena markas besarnya tetap eksis. Terlebih lagi Kabupaten Barito Selatan merupakan pelopor untuk mempertahankan kelembagaan fungsional penyuluhan pertanian di Propinsi Kalimantan Tengah, bahkan se-Kalimantan, atau se-Indonesia. Kepeloporannya merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang tidak dapat dilupakan jajaran pemerintah Kabupaten Barito Selatan ternyata menyadari dan tidak terbawa angin yang sedang bertiup untuk ikut-ikutan akan euphoria kebebasan yang tidak sesuai dengan semangat otonomi, seperti halnya beberapa Kabupaten/Kota lainnya yang belum ataupun tidak mempunyai kelembagaan penyuluhan pertanian dengan berbagai alasannya.

Kepeloporan dan keteladanannya yang telah ditunjukkan, didasari semangat

Atau lebih populer sebagai markasnya para Penyuluh Pertanian dalam merealisasikan peranannya sebagai mitranya petani.

menjalankan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. Dengan persetujuan DPRD Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Salah satu Perangkat Daerah dinamakan Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIPPK). Nama tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebetulnya kepedulian terhadap eksistensi kelembagaan penyuluhan pertanian oleh jajaran pemerintah Kabupaten dengan ibukotanya Buntok, terletak di pedalaman Pulau Kalimantan telah dibuktikan sejak 1 Juli 1998 dengan dibentuknya BIPP melalui Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 107 Tahun 1998, tentang Organisasi BIPP Kabupaten Barito Selatan. Melalui Keputusan tersebut dirintis kelembagaan penyuluhan pertanian dengan kantornya menumpang pada kantor

Satuan Pelaksana Bimas. Melihat kepedulian dan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, maka Pusat Penyuluhan pada waktu merespon positif, yaitu dengan mengupayakan bantuan pembangunan BIPP melalui program SPL-OECF. Melalui bantuan tersebut dapat dibangun sebuah kantor BIPP yang representatif untuk menjadi tempat operasional suatu kelembagaan fungsional penyuluhan, sehingga Kabupaten Barito Selatan dapat menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang memenuhi kebutuhan petani di wilayahnya.

Dengan dibangunnya kantor BIPP yang baru dan megah, menjadikan motivasi sendiri bagi para Penyuluh Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi tersebut menjadi lebih bertambah dengan diresmikannya penggunaan kantor BIPP Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 31 Oktober 2000 oleh Sekretaris Daerah mewakili Bupati Barito Selatan. Melalui pidato Bupati Barito Selatan yang dibacakan Sekretaris Daerah, memberikan harapan besar untuk dapat membangun sistem penyuluhan yang sesuai dengan harapan para penyuluh pertanian dan terutama bagi petani pada era otonomi. Dengan demikian penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat memberikan motivasi petani untuk dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya.

Semangat untuk pembangunan suatu kelembagaan penyuluhan pertanian yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus bergema dan bergerak maju. Dengan dibekali semangat reformasi pada era otonomi, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan merespon positif Keputusan

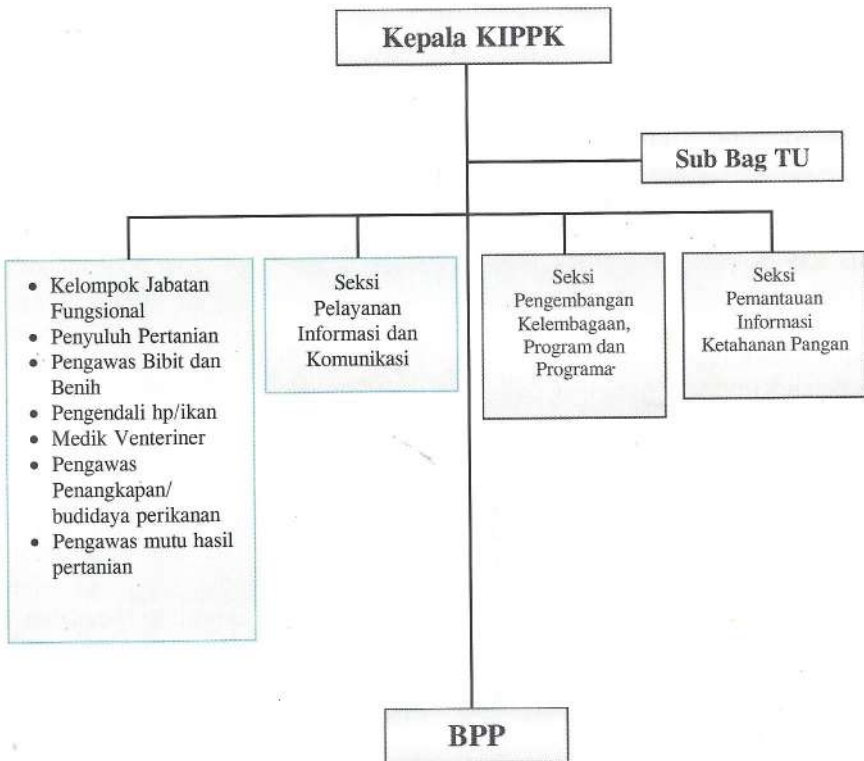
Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, yaitu memelopori terbangunnya kelembagaan penyuluhan pertanian yang bernama KIPPK sebagai pengganti dari BIPP.

Dengan pertimbangan dan keyakinan yang mantap nampaknya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengakomodasi sepenuhnya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. KIPPK sebagai suatu kelembagaan, atau organisasi, atau unit kerja, tidak dapat operasional tanpa tugas dan fungsinya yang jelas, sehingga tugas dan fungsinya disesuaikan pula. KIPP Barito Selatan juga mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan umum pemerintahan di daerah di bidang Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di wilayahnya. Dalam menyelenggarakan tugasnya KIPPK Kabupaten Barito Selatan menjalankan fungsi:

- (1) pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyuluhan, informasi dan komunikasi penyuluhan pertanian dan kehutanan;
- (2) penyediaan data dan rekomendasi pembangunan penyuluhan pertanian dan kehutanan dan;
- (3) pelayanan teknis di bidang penyuluhan, informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian dan kehutanan.

Tugas dan fungsi KIPPK Barito Selatan tidak dapat dilaksanakan dan berjalan tanpa dilengkapi dengan struktur organisasi dan sumberdaya manusiannya yang mengoperasionalkan. Oleh karena itu seiring dengan perubahan nama dan peningkatan status BIPP menjadi KIPPK, maka pada tanggal 10 Pebruari 2001, bersama-sama Perangkat Daerah lainnya, dilantik Ir. Eskop sebagai Kepala KIPPK sebagai Pejabat Eselon IIIa, disertai dengan Sub Bagian Tata Usaha dan 3 Seksi sebagai pejabat Eselon IVa-nya.

Sudah barang tentu, KIPPK Barito Selatan sebagai kelembagaan fungsional penyuluhan pertanian, tidak akan dapat melaksanakan tugas dan menjalankan fungsinya, apabila tidak didukung oleh pejabat fungsional khususnya Penyuluh Pertanian dan Pejabat Fungsional lainnya serta tenaga administrasi. Oleh karena itu, KIPPK Kabupaten Barito Selatan untuk mengoperasionalkan sistem penyuluhan pertanian pada era otonomi sekarang telah siap dengan 268 Penyuluh Pertanian yang bertugas di KIPPK dan 10 BPP sebagai unit



kerja (instansinya) di tingkat Kecamatan.

Pembentukan KIPPK, walaupun kelembagaan penyuluhan tersebut merupakan aparat Pemerintah Daerah Otonomi, sementara orang kurang peduli terhadap kebijakan Pemerintah (Pusat) dengan euphoria kebebasan untuk mengatur sendiri rumah tangga daerahnya, ternyata tidaklah demikian yang terjadi di Kabupaten Barito

Selatan. Kepedulian Jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terbukti dengan menempatkan peran KIPPK menjadi lebih penting, sebagaimana ucapan Ir. Eskop, Kepala KIPPK yang mantan Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Barito Selatan, dalam kesempatan lain setelah dilantik, antara lain mengatakan, bahwa yakin peran KIPPK menyongsong otonomi daerah sangat penting, terutama dengan ciri khasnya, penyuluhan mengarah kepada agribisnis perlu ada unit/klinik konsultasi agribisnis; dan (3) unit teknis pelayanan umum terutama bagi petani, pengusaha di bidang pertanian perlu didukung dengan alat komunikasi (internet) untuk memberi informasi serta akses pemasaran hasil pertanian dan kehutanan.

Dengan segala keterbatasannya yang dimiliki KIPPK Barito Selatan baik yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas

Pelayanan umum terutama bagi petani, perlu didukung dengan alat komunikasi (internet) untuk memberi informasi serta akses pemasaran hasil pertanian dan kehutanan.

penyuluh pertanian, maupun kendala dan permasalahan yang ada pada sarana, waktu, luas wilayah, jenis dan jumlah komoditas, serta banyaknya petani yang harus difasilitasi dan dilayani, melalui pendekatan kelompok, telah terbentuknya 604 kelompoktani.

Semangat yang membara dalam membangun sistem penyuluhan pertanian pemerintah Kabupaten Barito Selatan tidaklah pudar, sebagaimana

yang di kemukakan oleh jajaran Penyuluh Pertanian, yaitu bahwa Peran dan Kemampuan Kelompoktani akan terus ditingkatkan, melalui misinya, dengan mendayagunakan sumberdaya yang tersedia, secara lengkap dan terus menerus,antang menyerah sebagai falsafah penyuluh pertanian yang dipegang teguh, diharapkan akan dapat merealisasikan visi KIPPK Barito Selatan.

Sebagai fokus dan sasaran akhirnya para Penyuluh Pertanian sangat mendambakan terwujudnya masyarakat sejahtera, khususnya petani, melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap, melalui pengembangan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan, berbasis pada pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, akrab lingkungan sesuai dengan fungsinya. Selamat dan maju terus KIPPK Barito Selatan. (Duantono S.Pt/Sb).

IA terlahir sebagai putra ketiga dari 4 bersaudara di kota Semarang Jawa Tengah pada tanggal 6 Mei 1960. Kedua orang tuanya almarhum Prof. Dr. Ir. Moeljadi Banoewidjojo dan Hj. Soemarni Kartamiharja yang konon juga mencintai pertanian, telah meninggalkan seorang Unggul Abinowo yang kini lebih dikenal sebagai Wirausahawan Pertanian Berhasil di wilayahnya. Betapa tidak, usaha pertanian yang semula ia tekuni dari kecil-kecilan lantaran sejak duduk di bangku kelas II SMA, saat ini menjadi suatu bisnis pertanian dengan investasi milyaran rupiah yang berlokasi di 2 tempat, yaitu : (1) Desa Parelegi Purwodadi Kabupaten Pasuruan Telp. (0341) 425541 berupa Kebun Budi-daya Pertanian Terpadu, dan (2) di Jl. Raya Purwodadi No 1 Purwodadi Kab. Pasuruan Telp. (0341) 428717 Fax. (0341) 425542 berupa Terminal Agribisnis.



Ir. Unggul Abinowo, MS (Sw)

UNGGUL ABINOWO

Memadukan Beragam Jenis Usahatani Sebagai Kunci Sukses Agribisnis

Riwayat Merintis Usahatani

Di saat remaja sebagai siswa SMA saja ia telah gemar mencoba-coba bertanam sayuran dan berbagai jenis tanaman hortikultura. Kegiatan hobi itu berlanjut sebagai sambilan kuliah di Fakultas Pertanian Unibraw Malang, bahkan di saat akhir mahasiswa sering berurusan dengan kegiatan jual beli beras alias “berdagang beras” yang memiliki kelengkapan “Rice Milling Unit” dan membeli hasil panen

petani, disamping ia bertani padi secara berpindah pada lahan sewaan.

Status sebagai seorang petani menjadi kebanggaannya, walau telah lulus studi Sarjana tahun 1984 dan lulus studi Pasca Sarjana Teknik Manajemen Industri ITB Bandung tahun 1986. Setelah itu ia bertekad tidak lagi bertani secara berpindah pada lahan sewaan, namun di lahan sendiri dikelola secara mandiri dan intensif. Lahan dimaksud berlokasi di Desa Sentul



Terminal Agribisnis sebagai sarana distribusi produk dan media promosi (Sw)

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan seluas 5 ha. Keberhasilan bertani bawang merah dan semangka saat itu ternyata mengawali serangkaian perjuangan hingga menjadi Manajer Pengusaha Tani tertantang di awal era globalisasi sekarang ini.

Kreativitas mengaplikasikan Teknik Semi Hydroponik

Awal sukses berusaha tani juga ditandai keberhasilan menggali teknologi spesifik lokasi dengan menerapkan teknik hydroponik sesuai kondisi setempat pada tanaman tomat, cabe, terong, dan tanaman hortikultura lain yang dirakit sendiri selama hampir 8 tahun. Saat itu, tahun 1994 bertepatan tahun kelahiran putra pertamanya

Abinanto Dewabrata, semangat menguasai teknologi menjadi penting. Atas teknologi semi hidydropnik yang spesifik lokalita tersebut, maka kalangan masyarakat tani Desa Pucang Sari dapat memanfaatkan tanahnya yang tandus (marginal) dengan bertanam tomat, cabe, dan terong guna menambah penghasilannya. Dan Unggul sendiri akhirnya memperoleh Penghargaan dari Pemerintah sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional tahun 1996 dalam Bidang Pertanian.

Sejalan dengan berkreasi hydroponik tersebut, ia melakukan uji coba membuat pupuk SP 35 dan hasilnya cukup baik sehingga ia bersama petani setempat memperoleh kemudahan saprodi penye-

diaan pupuk guna menambah produksi. Sejak itu ia banyak menerima rekan petani magang hingga beberapa hari di lahan usaha taninya di Dusun Parelegi Purwodadi. Atas berbagai kemajuan yang diraih, maka pada tahun 1998, Unggul Abinowo terpilih menjadi Sekjen Satuan Pelaksana Tugas Pusat Brigade Pemuda Pelopor Pembangunan Desa (BP3D) sebagai wadah para pemuda pelopor tingkat Nasional berkreasi. Tidak terlalu lama saat itu, ia kemudian terpilih sebagai Sekjen KTNA Nasional, Ketua Aspeni Flora Jawa Timur, Kadin Kompartemen Pertanian Propinsi Jawa Timur dan Ketua II KTNA Jawa Timur.

Intregated Farming Pola Usahanya

Sukses dalam memadukan komponen/ jenis usaha tani dan manajemen merupakan kunci sukses mengembangkan Agribisnis. Pengalaman ini mengandung berbagai aspek, seperti: pengembangan potensi diri, kewirausahaan, pengambilan keputusan dan resiko, kreativitas inovasi, strategi bisnis yang meliputi manajemen, keuangan, pemasaran dan perkreditan.

Adapun berbagai jenis kegiatan usaha tani dan aspek teknologinya adalah sebagai berikut:

1. Bercocok tanam

- 1.1. Semi hidroponik: pembibitan dan penanaman, pemupukan dan pengairan, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen.
- 1.2. Budidaya tomat, lombok, melon, semangka sistim mulsa plastik hitam perak ((MPHP).
- 1.3. Perbanyak tanaman secara

vegetatif : teknik okulasi, grafting, teknik mencangkok, kultur jaringan.

2. Beternak

- 2.1. Ternak itik sistim kering, teknik perkandangan, pembuatan dan



Salah satu sudut Terminal Agribisnis Unggul Abinowo (Sw)

pemberian pakan, memilih DOD, pengendalian penyakit, Terminal agribisnis sebagai sarana distribusi produk dan media promosi pemeliharaan masa produksi, panen pasca panen, pemasaran, analisa usaha tani.

- 2.2. Ternak burung puyuh: penentuan lokasi, bibit, teknik produksi, hama penyakit, pasca panen telur.
- 2.3. Penggemukan sapi dan domba: pemilihan bibit, manajemen pakan dan pemasaran.

3. Pemanfaatan bahan dan limbah pertanian

- 3.1. Pemanfaatan limbah organik, pembuatan aneka bokhasi, aplikasi mikroba pengurai, hasil pengolahan limbah.

- 3.2. Pembuatan souvenir berbahan tumbuhan: anyam, ukir, rajut, makrame, kertas daur ulang.
- 3.3. Ukir buah-buahan: ukiran meja makan, ukiran souvenir.

4. Budidaya Ikan

Nila, Patin, lele, ikan hias, pembuatan pakan dan perawatan.

5. Pasca Panen

- 5.1. Teknik Pengolahan Hasil Pertanian: Pembuatan Telur Asin, Jahe Instan, Kunir Instan, Tepung Pisang, Jam, Manisan.
- 5.2. Dehidrated Vacum Fryer : Pembuatan kripik buah, manisan dan asinan.
- 5.3. Makanan kecil (snack) berkhasiat jamu : kripik kunyit, manisan jahe, sirup lidah buaya, dll.

6. Manajemen dan Informasi

- Sistem Informasi Manajemen Agribisnis : Browsing, Chatting, net-etika.
- E-Commerce/Internet Agribisnis Klas B2, B1, B2C, e-mail, nilist, membangun web e-broadcasting.

7. Pelayanan Kunjungan Tamu

Disediakan suatu lokasi suasana santai, serius dan bermanfaat dengan fasilitas café memiliki menu andalan segar baru dipetik hasil kebun pertanian organik, kamar mandi, listrik, lapangan parkir, telepon, taman, kebun terpadu dan ruang terbuka.

Membangun Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu (SPAT Pasuruan)

Unggul Abinowo berkeyakinan bahwa keanekaragaman potensi sumber daya hayati pertanian dapat dioptimalkan pengembangannya sebagai satu keterkaitan saling menunjang, tidak hanya sekadar teknis budidaya namun juga pengolahan produk dan penetrasi pasarnya. Oleh karena itu SPAT yang berhasil ia bangun selama ini berorientasi pada 6 (enam) fokus kegiatan utama, yaitu :

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu. Proses belajar mengajar pertanian yang berlangsung di lapangan usaha tani ternyata cukup banyak diminati petani bahkan pemuda tani, karang taruna, pemuda pondok pesantren, siswa sekolah pertanian. Pelaksanaan Diklat dikembangkan bekerjasama dengan berbagai kelembagaan terkait seperti Balai Diklat Pertanian, Balai Penelitian, Pusat Studi Wanita, PT Boma Bisma Indra, KTNA, Asspeni-Flora dan Ajindo.

Sasaran peserta Diklat tidak hanya petani tapi semua lapisan masyarakat yang terlibat, tertarik dan tergerak menjadikan pertanian sebagai wahana menggali potensi untuk meningkatkan pendapatannya. Adapun pernah ikut Diklat ini antara lain: 30 Pemuda terpilih se Kabupaten Pasuruan, para santri Pondok Pesantren/Pellindo se Jawa Timur, Anggota TNI di Pusdik POM Cimahi, Anggota TNI AL dari Teluk Ratei Lampung, para Pengungsi di Ambon (Operasi Surya Baskara Jaya TNI AL, Ibu-ibu PKK, para petani/KTNA.

Dalam praktek Diklat ini, para peserta dididik dan dilatih dengan komposisi

pembelajaran 80 % praktek dan 20 % teori. Lingkup materi meliputi teknik budidaya, manajemen agribisnis, pengolahan pasca panen dan teknik mengakses pasar termasuk pemahaman nilai moral atau etika bisnis pertanian.



Kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu (Sw)

Contoh materi tersebut antara lain: pelatihan penangkaran mutu dan benih mangga, pembuatan souvenir berbahan baku limbah pertanian, teknologi semi hidroponik, pestisida berbahan alami, budidaya jamur edible (dapat dimakan), bawang merah.

2. Merintis Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Agribisnis. Inventarisasi berbagai data tentang potensi daerah (sentra-sentra produksi lokal spesifik), data kebutuhan akan produk pertanian, jenis dan kualifikasi produk yang sesuai dengan permintaan pasar, data/informasi berkaitan dengan aktivitas agribisnis skala lokal, regional dan internasional.

3. Mengkaji Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Desa. Melaksanakan seminar, diskusi lintas sektoral, audiensi, temu bedah buku dan kegiatan ilmiah lainnya

4. Mengembangkan teknologi tepat guna. Teknologi spesifik lokalita hasil rekaan karya nyata petani di lapangan patut diuji kebenarannya guna memperoleh hak paten dan disebarluaskan kepada petani lain.

5. Menginventarisasi dan mengkaji masalah yang dihadapi masyarakat pertanian dalam upaya pengembangan agri-bisnisnya, terutama yang terkait dengan kebutuhan modal operasi dan investasi serta pasarnya. SPAT telah berperan menjadi mediator penyaluran dan penampung hasil panen dan beberapa produk petani.

6. Mengelola Terminal Agribisnis. Telah berhasil mewujudkan sebuah tempat sebagai pusat aktivitas bisnis pertanian alamat di Jl. Raya Purwodadi No 1 berjarak sekitar 500 m dari pusat Kota Lawang-Malang. Tempat ini didesain sangat menarik dimana akhir ini semakin banyak tamu konsumen senang berkunjung/singgah seraya menikmati keindahan lingkungan yang sejuk disana. Berbagai produk tanaman hias, hasil olahan para petani termasuk produk usaha Kelompok Petani-nelayan Kecil (KPK), dan berbagai produk obat pertanian dan bibit tanaman.

Dari sejumlah produk yang disajikan, terdapat 1 (satu) jenis produk hasil olahan bernama "Bak Pao' Telo" dan banyak digemari konsumen. Terminal Agribisnis ini tidak sekadar sebagai sarana distribusi produk dan media promosi, melainkan juga sebagai Pusat Data dan Informasi sekaligus tempat pengolahan produk pertanian yang layak jual untuk pasar lokal, regional maupun ekspor. (Sw)

John Kliwon Manik:

Usaha Tani Tumpuan Hidupku

SEMPAT merasa khawatir ketika menatap masa depan, dengan kondisi lapangan kerja serba terbatas ditambah modal usaha yang tidak memadai, akhirnya John Kliwon mem-beranikan diri hidup total disektor petanian. Wujud dari semua itu adalah usaha taninya yang kini makin berkembang apalagi setelah ia mengikuti program magang Jepang.

Sekitar 23 Km dari Pematang Siantar menuju arah Danau Toba, kemudian menuruni jalan setapak yang berkelok dan berbukit, dengan latar belakang pemandangan rumah-rumah adat dan makam leluhur suku Batak yang artistik serta melewati jembatan gantung, melewati jurang menganga akhirnya setelah \pm 1 jam perjalanan tibalah di desa Dolok Paramanangan tempat tinggal dan tempat usaha tani John Kliwon Manik, taruna tani yang pernah magang ke Jepang melalui program pelatihan magang kerjasama antara Deptan dengan The Japan Agricultural Exchange Council (JAEC dan Yampi).

Ketika ditanya motivasi ikut magang di Jepang, menurutnya ia ingin meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan

dan menumbuhkan kreatifitas, sikap kritis, rasa percaya diri sebagai bekal untuk usaha tani sebagai sumber mata pencaharian.

Sebelum Ikut Magang

Sempat merasa khawatir ketika menatap masa depan, dengan kondisi lapangan kerja serba terbatas ditambah modal usaha yang tidak memadai

Sebelum berangkat ke Jepang, John Kliwon membantu orang tuanya berusaha tani padi di lahan seluas \pm 3 Ha. Karena kecintaanya di bidang pertanian John Kliwon sering mengikuti kursus tani di Dinas Pertanian, bahkan karena kiprahnya cukup

menonjol ia dipercaya mengikuti *Peda* di Simalungun dan *Penas* tahun 1991 di Magelang. Karena kiprahnya tersebut ia mendapat penghargaan sebagai taruna tani teladan. Merasa kemampuannya yang masih terbatas ia masih ragu apakah akan terus berusahatani atau berusaha lain untuk masa depannya. Ditengah keraguannya tersebut ia ditawarkan mengikuti seleksi calon peserta magang di Jepang, yang dilakukan oleh Kanwil Deptan setempat.

Namun ia berpendapat, seharusnya seleksi untuk program magang ini harus

benar-bebar ketat, tidak boleh ada unsur nepotisme, bahkan sebaiknya harus mendapat rekomendasi dari kontak tani, dan instansi terkait di sekitar desa. Ini penting karena dengan cara ini diharapkan para alumni magang Jepang dapat berkiprah di sektor pertanian dan berdampak positif bagi petani disekitar lahan usahanya serta mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan lahan usahatani demikian ia menambahkan.

Sebelum berangkat ke Jepang ia mengikuti latihan orientasi selama \pm 30 hari di Bogor untuk mempersiapkan fisik dan mental. Menurutnya pada tahap ini perlu dibangun disiplin, etos kerja, tanggung jawab serta meningkatkan pengetahuan tentang budaya dan bahasa Jepang. Bagi tarunatani yang belum siap fisik dan mental sebaiknya dipulangkan saja ke daerah asal. Ini penting karena ia melihat ada kawan yang belum siap, tapi nekat berangkat, akhirnya stress. Disamping itu bahasa dan tulisan kanji (tulisan Jepang) perlu ditingkatkan jamnya agar bisa mengikuti proses belajar mengajar disana ia menambahkan.

Kagumi Etos Kerja Petani Jepang

Setelah lolos pada orientasi, dengan tekad bulat menuju masa depan ia berangkat ke Jepang. Disana ia ditempatkan di rumah Kazumori Tominaga di daerah Adagono. Ia belajar usahatani padi, jeruk, apel dan jahe. Selama belajar sambil bekerja di induk semangnya, ia sempat terkesan dengan etos kerja mereka. "Pada umumnya petani di Jepang mempunyai Etos kerja yang tinggi. Ia total menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

Pemanfaatan waktupun digunakan secara efektif dan efisien. Pada saat kerja ia gunakan waktunya betul-betul untuk bekerja dan pada waktu istirahat betul-betul untuk melepaskan lelah. Pada waktu luang ia biasanya proaktif mencari informasi untuk mengembangkan usahatannya.

Bahkan saya pernah diajak ke Tumori yaitu suatu tempat pelatihan bagi pemuda tani di Jepang dan ke Ibora Liken yang merupakan laboratorium pertanian paling besar milik pemerintah Jepang. Istilah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang tidak bermanfaat tidak ada dalam kamusnya". Demikian John Kliwon menceritakan etos kerja induk semangnya.

Kazumori Tominaga bapak angkatnya, seorang petani yang mengusahakan padi, hortikultura, ternak sapi potong dan ayam. Luas lahan padi sekitar 7 Ha dan tanaman hortikultura sekitar 3 Ha serta ternak pada lahan 0,5 Ha. Untuk ukuran petani Jepang skala usaha Kazumori Tominaga tergolong sedang. Menurut John Kliwon hasil panen usahatannya biasa dijual ke koperasi. Tentu saja selama disana iapun mempelajari betul dan melakukan apa yang dilakukan induk semangnya. Ia ikut menyemai, menanam padi, mengolah lahan dengan traktor dan mempelajari berbagai budidaya buah-buahan seperti jeruk dan apel.

Selain berusaha tani induk semangnyaapun membuat kompos dan bokasi dari limbah usaha taninya. Jhon Kliwon pun langsung terjun bekerja dan mempelajari teknologinya.

Pada awal magang, ia sangat kaget dengan pola kerja induk semangnya, yang

begitu tinggi etos kerjanya. Namun setelah diredungkan akhirnya menyadari mengapa petani Jepang umumnya tingkat kesejahteraannya cukup tinggi. John Kliwon menyimpulkan ada beberapa kiat pola kerja petani Jepang yang bisa diteladani. Diantaranya bekerja secara "TOTAL", penggunaan waktu yang optimal, disiplin tinggi, menghargai janji, semangat tinggi dan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian setiap merencanakan dan melaksanakan usahataniya.

Mulai Total Berusahatani

Tanpa terasa setelah \pm satu tahun mempelajari teknologi, etos kerja dan manajemen usahatani induk semangnya ia kembali ke tanah kelahirannya di Desa Dolok Pantibuan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Dengan dukungan orangtuanya yang mewariskan lahan seluas 3 Ha ditambah dukungan kakak-kakaknya yang pengusaha, pengacara dan anggota TNI, mulailah ia mengembangkan usahatani secara total. Awalnya bersama tarunatani dan pemudatani sekitar desa ia membangun kelompok tani "Cinta Damai" dan kebetulan John terpilih menjadi ketua kelompok.

Pada saat pertemuan dengan anggotanya acapkali ia menularkan pengalamannya untuk memotivasi kelompoknya. Mengingat sarana pengairan dan transportasi sangat terbatas, ia dan kelompoknya dibantu masyarakat setempat bergotong-royong membangun saluran irigasi dan sarana jalan sederhana. Untuk memelihara dan mengatur pembagian air dari saluran tersebut, berdasarkan musyawarah, ditetapkan beberapa orang untuk menanganinya. Sebagai kompensasi orang tersebut

mendapat 5% dari hasil panen petani yang dilalui saluran tersebut.

Pada unit hamparan usahatani padi kelompoknya, teknologi pemupukan dan pembrantasan hama secara terpadu hasil pengalamannya di Jepang ia terapkan, akhirnya pada saat panen, rata-rata produktivitas padi unit hamparan kelompoknya dapat mencapai 4 Ton/Ha.

Namun hambatannya dalam berusahatani adalah terbatasnya tenaga kerja, karena umumnya pemuda-pemuda di sekitar desa merantau ke Pulau Jawa, karena itu sangat memimpikan berkembangnya alat mesin pertanian di desanya. Saat masih kurang dibanding dengan jumlah tenaga kerja dan luasnya lahan usahatani di sekitar desanya. Disamping usahatani padi Jhon Kliwon yang pernah kuliah di Akademi Pertanian, juga berusahatani jahe, kopi, cabe dan beternak ayam buras.

Menurutnya hasil jahe dan kopi hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk kopi dan jahe, pangsa pasarnya sudah ada, bahkan ia sudah bermitra dengan salah satu perusahaan swasta hingga masalah harga dan pemasaran bukan kendala. Dalam setahun usahatani jahe dilahan 1 Ha miliknya dapat menghasilkan 1000 Kg dan kopi sekitar 500 kg di lahannya seluas 0,5 Ha. Di lahan pekarangan tempat tinggalnya pun ia gunakan untuk usaha. Puluhan ekor ayam buras dan berbagai komoditas "has" pekarangan nampak teratur rapi. Limbah dari ayam buras dan gabah padi ia manfaatkan untuk menanam cabe dengan hasil cukup lumayan. Di sekitar desanya terdapat perbukitan yang masih lahan tidur.

Ia dan kelompoknya dibantu untuk melestarikan lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan.

Sosialisasi Pengalaman

Kiat-kiat pola kerja petani Jepang ia tularkan pada masyarakat disekitar desanya baik secara formal di pertemuan-pertemuan kelompok, rapat desanya baik secara informal di warung-warung kopi. Ini perlu disebarluaskan, karena kedudukan petani di Jepang sangat terhormat bila ditinjau dari kesejahteraannya. Dan ini tidak diraih begitu saja tanpa etos karya dan menciptakan lingkungan kerja kondusif, demikian ia menegaskan.

Sosialisasi pengalamannya di Jepang tidak hanya disebarluaskan di sekitar desanya. Menurut Pak Gurming, Kepala BPP Prapat, Jhon Kliwon sering juga tampil pada acara mimbar sarasehan, gelar teknologi, kursus-kursus tani baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Pada acara tersebut ia sering tampil mempresentasikan pengalaman berusahatani maupun pengalamannya selama di Jepang.

Ingin Jadi Petani Sejahtera

Dengan modal lahan miliknya dan pinjaman orang tua, serta modal usaha dari kakak-kakaknya, ia mulai berangan-angan menjadi petani yang sukses. Untuk itulah saat ini ia mulai mencari-cari kemitraan

dengan pihak swasta maupun pihak pemerintah.

Bersama Pak Gurming, saat ini dipercaya PT Pioner untuk mengembangkan jagung Hibrida di wilayah Prapat. Dari hasil usahataniya, saat ini penghasilan perbulannya mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai hasil panen padi, jahe, kopi, ayam buras, jual beli bibit babi dan cabe. Namum ia merasa masih belum puas dengan keadaan kesejahteraan saat ini.

Untuk mengembangkan usahataniya ia masih proaktif mencari informasi” ke pihak swasta, pemerintah, alumni magang Jepang bahkan kepada mantan induk semangnya. Hubungan induk semangnya di Jepang masih di lakukan, walaupun tidak terlalu sering. Pertahun kira-kira 2 kali mereka saling berkirim surat. Bahkan pada tahun 1998 induk semangnya pernah berkunjung ke rumah

Saya merasa yakin mengelola usahatani secara “total” dan profesional dapat dijadikan tumpuan hidup

dan lahan usahanya.

Saya merasa yakin mengelola usahatani secara “total” dan profesional dapat dijadikan tumpuan hidup. Apalagi di era krisis saat ini, sektor ini bisa di jadikan katup pengaman. Untuk itu saya akan menerapkan kiat-kiat pola karya dan manajemen usahatani petani Jepang sesuai kemampuan dan kondisi di wilayah saya. Demikian penegasan Jhon Kliwon tentang keyakinan dan strateginya untuk menjadikan usahatani sebagai harapan dan tumpuan hidupnya. (Ch)



Mereka Yang Menghasilkan, Harus Menikmati!

Oleh:

Gunawan Sumodiningrat

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang
Kewilayahan Kebangsaan dan Kemanusiaan

GUNAWAN Sumodiningrat mengemukakan bahwa pembangunan semestinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat itu siapa? Kalau pertanian, yang dimaksud dengan rakyat dengan sendirinya adalah petani. Untuk bidang pertanian yakni *dari petani oleh petani dan untuk petani*. Maksudnya, di bidang pertanian petani sebagai manusianya. Hal ini prinsip, karena dalam pembangunan yang benar, titik sentralnya adalah manusianya yang harus melaksanakan pembangunan. “Membangun dirinya sendiri!” ujarnya.

Apa arti dari semua itu? Menurut Sumodiningrat, pertama, manusia harus mampu merumuskan masalahnya sendiri, kedua, harus mampu merencanakan sendiri, yang ketiga, mampu memecahkan masalahnya sendiri. “Itu hakekat dari pembangunan”, paparnya. Untuk apa kesemuanya itu? “Untuk hidup!” tegasnya. Karena manusia harus hidup, maka agar dapat hidup perlu makan dan untuk makan harus menghasilkan. Karenanya, mereka yang menghasilkan seharusnya mereka juga menikmati. “Jadi, di situ ada konsumsi dan ada produksi,; lanjutnya.

Pengertian tadi, kalau orang ekonomi

mengatakan supply untuk demand dari supply, dan sebaliknya. Tempat bertemunya supply dan demand adalah pasar. Itu yang dinamakan dengan mekanisme pasar.

Pada sisi lain Gunawan Sumodiningrat menegaskan bahwa pada intinya pembangunan adalah proses untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bukan hanya membangun gedung dan lain sebagainya. Gedung hanyalah sarana yang harus dimanfaatkan untuk dapat menciptakan kesejahteraan. Kendati begitu, pada hakekatnya kesejahteraan dapat diwujudkan dari konsumsi yang tinggi dalam arti luas.

Kualitas konsumsi dapat didekati secara fisik dengan mensejahterakan pancaindranya, seperti mulut, hidung, telinga, mata dan lain sebagainya. Untuk mulut, misalnya, dia mendapatkan makan yang enak dan bergizi, dia juga dapat menghirup udara yang bersih dan segar. Dia dapat melihat pemandangan indah, dapat pula mendengarkan suara merdu untuk menghasilkan inspirasi yang bagus, dan lain sebagainya.

Menyuluh Dirinya

Sebagaimana dimaklumi, manusia

pada dasarnya selalu ingin tahu, mau tahu dan mau diberi tahu. Dengan pendekatan manajemen ada dua kemungkinan : Pertama, dia akan tahu secara alamiah, dan yang Kedua, dia akan tahu melalui proses belajar. Kita akan menjadi tahu sesuatu karena mau belajar.

Dalam hal adanya inovasi baru, idealnya manusia tahu sendiri secara alami. Tapi sayangnya, orang tidak mungkin akan tahu semuanya. Karenanya, harus diberi tahu oleh orang lain yang mengetahuinya. Semestinya semua orang dapat memberi tahu pada orang lain yang ingin mengetahui sesuatu. Mereka yang memberi tahu adalah penerang atau penyuluh. Dengan demikian pada prinsipnya semua orang adalah sebagai penyuluh

Dalam hal penyuluhan, sampai saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya, tentang perumusan dari tujuan penyuluhan itu? Dalam hal ini tujuannya yang benar adalah agar supaya mereka tahu sendiri berjalan secara alamiah.

Gunawan memaparkan bahwa setiap orang hidup makan dari apa yang dihasilkannya, itu artinya mereka sudah melakukan sistem ekonomi. Karena ekonomi adalah ilmu untuk mengatur rumah tangga yang sejahtera. Tapi, dia dapat dikatakan sejahtera kalau mampu me-

nikmati yang dihasilkannya.

Pengertian ini bagi orang sosiologi disebut hukum karma, dengan prinsip bahwa mereka mampu berperan serta untuk menghasilkan dan sekaligus menikmati.

Pada dasarnya, dalam setiap kehidupan manusia mengandung prinsip ekonomi. Karena pengertian rumah tangga tadi adalah mulai dari seseorang kemudian bergabung jadi dua orang atau lebih yang disebut sebagai mikro. Dari mikro dan mikro bergabung menjadi makro bergabung menjadi global. Mengembangkan pengetahuan ekonomi tadi dengan sendirinya harus dimulai diri pribadinya masing-masing, termasuk para penyuluh.

Tetapi pengertian seperti yang diuraikan di atas, belum dipahami oleh semua orang. Bahkan, oleh para penyuluh itu sendiri. Karenanya semua orang termasuk penyuluh pertanian, pertama-tama setidak-tidaknya harus menyuluh dirinya sendiri. Maksudnya, yaitu tadi, untuk mengembalikan kepada hakekat dari kehidupan, bermasyarakat, bernegara, dan menjadi masyarakat dunia.

Sayangnya, pemahaman terhadap penyuluhan sekarang ini belum jelas. Misalnya: untuk apa penyuluhan? Siapa yang disuluh? Bagaimana menyuluhnya? Alasan Gunawan, pasalnya para penyuluh harus menyuluh dirinya sendiri supaya

Manusia harus mampu merumuskan, merencanakan, dan memecahkan masalahnya sendiri. Itu hakekat dari pembangunan.

menjadi yang layak, yakni sadar terhadap arti ekonomi dengan proses alami, yaitu orang menikmati adalah mereka yang menghasilkan. Kalau tidak bisa, artinya gagal dalam menyuluhnya.

Apa artinya dari kegagalan itu? Gunawan Sumodingrat memberi gambaran sebagai contoh: Dia menghasilkan tapi tidak bisa menjual. Kalau menjual tidak untung. Kalau menabung, tidak bertambah banyak. Kalaupun bertambah banyak tidak bisa menginvestasikan tidak menghasilkan lebih tinggi.

Market Mekanisme

Berbicara tentang market mekanisme, Gunawan menuturkan bahwa kalau semua berjalan secara alamiah, atau mengikuti alam, maka kita akan berjalan dalam sistem market mekanisme yang benar. Permasalahannya banyak yang tidak mengikuti market mekanisme itu secara alami. Akhirnya marketnya gagal.

Kalau masyarakat mengikuti perkembangan alami, maka dia akan berhasil dengan sendirinya. Kita mengikuti keadaan alam, ada siang dan malam, ada hujan, ada kemarau. Pada waktu siang kita sudah mengetahui siang kita sudah mengetahui di malam hari akan gelap. Maka sudah menyiapkan lampu penerang.

Demikian pula pada proses alami produk pertanian, ada musim panen dan ada musim paceklik. Pada musim panen, kita tahu akan paceklik, maka bersiap dengan menyimpan produk untuk keperluan paceklik. Jika hal ini terjadi, sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi peranan pemerintah. Pemerintah turun tangan diperlukan saja, misalnya jika suplay dan

demand tidak ketemu." Disini pemerintah masuk. Jadi pemerintah harus melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan petani," kata Gunawan.

Demikian pula dalam menjaga mekanisme pasar. Kalau petani tidak bisa, maka pemerintah harus bisa mengembalikan kepada mekanisme pasar.

Kenapa demikian? Selama ini peran pemerintah dipaksakan. Hal ini dapat dimengerti, lantaran sesuai dengan proses terbentuknya pemerintah itu sendiri. Seyogyanya, pemerintah yang benar adalah yang muncul dari masyarakat. Paling tidak mempunyai hakekat dan nurani seperti yang diinginkan masyarakat itu sendiri.

Persoalan ini muncul berkaitan dengan proses terbentuknya suatu negara berproses mulai dari individu, masyarakat, kelompok masyarakat dan lain sebagainya, kemudian membentuk negara. Proses yang terjadi pada negara kita adalah melalui kemerdekaan. Dapat dikatakan, setelah pemerintah ada, kemudian ada institusi rakyat. Secara teoritis yang benar adalah rakyat dulu, kemudian membentuk pemerintahan.

Peran Pemerintah

Menyinggung tentang ekonomi kerakyatan yang mencuat akhir-akhir ini, Gunawan Sumodingrat menegaskan bahwa "Ekonomi ya ekonomi. Ekonomi yang benar adalah ekonomi rakyat itu. Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi itu sendiri," ungkapinya.

Untuk membedakannya, yaitu tadi, dengan pendekatan pada cikal-bakal terbentuknya negara, yang dimulai dengan

kemerdekaan. Sebelum merdeka ada dua sisi yang berbeda. Satu sisi penjajah dan pada sisi lain rakyat yang dijajah. Penjajah mempunyai sistem ekonomi sendiri yaitu ekonomi penjajah atau ekonomi kapitalis. Sedangkan rakyat yang dijajah, kita katakan sebagai ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan. Para ekonomi mengatakan sebagai *people economy*, karena pelakunya adalah rakyat.

Selanjutnya, Gunawan Sumodiningrat menegaskan bahwa idealnya, mekanisme ekonomi dengan keseimbangan antara *supply* dan *demand* berjalan secara alami. Keseimbangan sering tidak terjadi karena ada distorsi dari apa yang disebut sebagai *homo-economicus*. Contohnya: sebagai produsen, dia banyaknya, sementara penjual ini menjual sedikit dengan harga tinggi. Si pembeli atau konsumen, ingin membeli banyak dengan membayar sedikit. "Jika demikian, tentu saja pasar gagal!" tegasnya.

Karena pasar gagal, maka harus ada intervensi. Di sini perlu munculnya peranan pemerintah. Dengan intervensi ini akibatnya, mekanisme pasar tidak terjadi, karena dikendalikan oleh pasar itu sendiri. Kalau terjadi surplus produksi melebihi konsumsi, disimpan menjadi stok. Di situ terjadi *disequilibrium*.

Di bidang pertanian, kalau panen berlebih, kalau *paceklik* defisit. Kalau berlangsung hanya sebentar tidak masalah, nanti akan kembali ke mekanisme pasar. Namun sayang apa yang sering terjadi defisitnya berkempanjangan, sehingga campur tangannya pemerintah tidak efektif. Mekanisme pasar gagal.

Patut disayangkan bahwa saat ini

pemahaman terhadap saat ini pemahaman terhadap intervensi sering diartikan yang tidak benar. Hal ini terjadi karena dari sistem klasik kemudian malah masuk peran pemerintah. Peran pemerintah mengendalikan: pada waktu surplus menyimpan dan pada waktu defisit mengeluarkan. Tapi pemerintah semestinya hanya memerintahkan saja, misalnya saat untuk menyimpan dan saat untuk menjual dengan memihak pada pasar.

Bagaimana agar peran pemerintah efektif? Menurut Gunawan Sumodiningrat, pertama harus diberi visi yang jelas, yakni pembangunan dari manusia oleh manusia dan untuk manusia. Dalam kata lain, yang menghasilkan harus menikmati dan yang menikmati harus menghasilkan. Perlu dipahami bahwa di situ ada siklus yang namanya surplus dan defisit. Surplus dan defisit ini harus dikendalikan oleh yang namanya visi tadi.

Kedua dari visi menjadi misi. Misi adalah untuk mewujudkan visi. Sayangnya selama ini kita hanya sampai di visi saja, tidak pernah mewujudkan misi. Coba simak, pada waktu surplus diam saja, demikian juga pada waktu defisit diam. Kalau visinya terwujud, dan semua melaksanakan misi dengan benar, maka tidak akan pernah terjadi kesenjangan yang berkepanjangan.

Jika semua mempunyai visi yang sama, dan semua menikmati dan semua menghasilkan, maka jika terjadinya surplus sedikit atau defisit juga sedikit, dengan cepat kembali lagi ke keseimbangan. Karena baik surplus maupun defisit dapat diselesaikan diantara mereka sendiri yakni antara *supply* dan *demand*.

Ketiga, setelah memiliki visi, misi, maka diperlukan aksi. Untuk keberhasilan aksi, yang paling penting adalah leadership, terutama pimpinan yang tertinggi. Setidaknya dia harus konsisten, sehingga aksi perlu diwujudkan menjadi realita.

Untuk keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan pertanian ditempuh dengan lima langkah, yaitu: Pertama, kita harus memiliki visi dan misi, Kedua, memiliki strategi aksi yang dijadikan sebagai pedoman. Ketiga, pedoman ini dimasyarakatkan. Masyarakat diberi tahu sesuai dengan keinginan mereka. Keempat, melakukan koordinasi. Kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Setidaknya dapat mengetahui: sudah betulkah penyuluhan? Kalau petani kurang pandai, maka penyuluh yang salah.

Peran Pemerintah dalam kerangka pembinaan sumberdaya agar yang memproduksi menikmati, maka pertama pemerintah harus mampu memberikan informasi secara cepat, tepat dan benar. Kedua melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Ketiga, membuat regulasi yakni membuat aturan pokok atau main role. Aturan ini munculnya harus dari bawah. Keempat, kita harus mengembangkan percontohan atau pilot proyek yang dikembangkan dua arah yakni dari atas dan dari bawah. Kelima, melakukan monitoring dan evaluasi.

Untuk meningkatkan peran aparat pemerintah, khususnya para penyuluh pertanian dalam melaksanakan pembangunan maka dipandang perlu untuk penyempurnaan pengaturan yang ada diantaranya yang berupa Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

sehingga sesuai dengan visi, misi dan aksi, seperti kesemuanya itu perlu merangkum lima aspek dasar, yaitu, pertama, manusia-nya agar diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam bersaing, sehingga manusia itu nantinya berdaya saing tinggi.

Kedua, memperhatikan perekonomian-nya, sehingga mempunyai kualitas daya hidup yang tinggi pula. Ketiga; penyiapan daya dukung yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keempat membina kebiasaan, atau institusinya. Artinya semua langkah yang menjadi tugasnya diharapkan melembaga, sehingga pada gilirannya tidak perlu disuruh lagi, mereka sudah dengan sendirinya mengerjakan yang menjadi tugasnya itu. Kelima, daya lestari, maksudnya supaya kemampuannya terus meningkat dan bertambah sesuai dengan perkembangan jaman.

Untuk mencapai keinginan seperti dirumuskan dalam lima pedoman dasar tadi, perlu didukung oleh program-program, antara lain: program peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan daya hidup, peningkatan perekonomian, prasarana dan sarana, pelembagaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pada bagian akhir paparannya, Gunawan Sumodiningrat memberikan bekal bahwa prinsip orang hidup harus mampu melakukan alur: pikir, ucap, tulis, laksanakan, dan menghasilkan. Kita senantiasa selalu berfikir positif, apa yang dipikirkan harus dapat dituliskan atau dirumuskan, apa yang dituliskan, harus dapat dilaksanakan, dan akhirnya harus menghasilkan seperti apa yang dipikirkan. (Rsm/As).



Aspek Sosio-Budaya dan Peningkatan Daya Saing Pertanian "Tradisional"

Oleh:

Ir. H. Tri Pranadji, M.Si.

Ahli Peneliti Utama pada Pusat Sosial
Ekonomi Pertanian

ADA semacam kekhawatiran yang serius bahwa jika pertanian Indonesia ambruk, maka secara hampir bersamaan akan ambruk pula bangsa Indonesia. Sektor ekonomi lain, seperti industri mobil nasional atau pesawat terbang, walaupun telah banyak menguras sumberdaya ekonomi kita, boleh saja gulung tikar; namun sektor pertanian haruslah tetap hidup dan terus berkembang. Jika perlu sektor pertanian haruslah tetap hidup dan terus berkembang. Jika perlu sektor pertanian haruslah bisa diandalkan sebagai tulang punggung perekonomian nasional kita. Mewujudkan hal ini selain bukanlah pekerjaan mudah, namun momentum ke arah itu juga sudah agak terlewat.

Belajar dari krisis yang kita hadapi selama hampir empat tahun terakhir, sepertinya kita tidak lagi bisa mengelak bahwa nasib masa depan masyarakat Indonesia, yang sebagian besar masih bergulat di sektor pertanian, terletak pada kemajuan sektor pertanian. Hanya saja, menghilangkan anggapan di kalangan elit pemikir ekonomi bahwa sektor pertanian tidak bisa dijadikan andalan perekonomian hingga saat

ini masih sangat sulit. Para pakar pertanian kita sendiri hingga kini masih banyak "terkurung" pada pikiran bahwa keberhasilan kegiatan pertanian adalah keberhasilan kegiatan "bercocok tanam". Akibatnya, dewasa ini semakin terasa bahwa produk-produk pertanian kita di pasarnya dunia maupun dalam negeri mengalami tekanan yang berat menghadapi persaingan dengan produk pertanian yang berasal dari negara lain. Dalam kancah perekonomian nasional seperti ini, sektor pertanian kita seakan-akan pada posisi "mati segan dan hiduppun tidak bermasa depan".

Memasuki era peradaban persaingan pasar bebas, (sektor) pertanian tradisional dihadapkan pada satu pilihan yang tidak ditawarkan lagi, yaitu "*meningkatkan daya saingnya untuk bisa berkompetisi secara terbuka di pasar global atau mati sama sekali*". Meningkatkan daya saing pertanian hanya dengan (misalnya) memberi subsidi pada harga input, kebijakan harga dasar atau memberlakukan tarif untuk produk pertanian yang didatangkan dari luar (impor) tidak lagi bisa diandalkan sebagai

obat mujarab. Di samping hal itu membuat sistem pertanian tradisional akan menjadi “semakin manja” dan semakin tidak kompetitif, namun juga tidak sesuai dengan spirit globalisasi pasar. Kekuatan daya saing pertanian kita perlu dibangun di atas landasan tatanan sosio-budaya yang bisa lebih menjamin terwujudnya sistem pertanian tradisional kita yang tangguh secara berkesinambungan.

Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa lemahnya aspek sosio-budaya akan menjadi suatu masyarakat kurang memiliki daya saing tinggi dalam dinamika kehidupan ekonomi lokal, regional dan global. Hal ini hampir dipastikan akan berlaku juga pada kehidupan (ekonomi) masyarakat pertanian tradisional di Indonesia. Hingga dewasa ini masyarakat pertanian Indonesia hampir secara keseluruhan masih cukup sarat mencerminkan keterbelakangan dalam kinerja ekonominya. Masih rendahnya nilai tukar hampir pada setiap produk pertanian rakyat kita, dengan demikian, dapat dipandang sebagai cerminan dari lemahnya aspek sosio-budaya yang melatarbelakangi kegiatan ekonomi pertanian rakyat tadi. Modul sosial atau *capital* kita untuk membangun daya saing sektor pertanian tradisional selama ini bukan saja banyak terabaikan dan mengalami penurunan kapasitas, namun juga tidak pernah mengalami sentuhan halus dari tangan-tangan profe-

sional secara signifikan.

Aspek sosio-budaya dapat dipandang sebagai kata lain (sinonim) dari aspek budaya non-material (Ogburn dalam Sorokin, 1957 dan Pranadji, 2000). Penggunaan istilah tadi sekaligus untuk



Pertanian tradisional dihadapkan pada satu pilihan yang tidak ditawarkan lagi, yaitu: meningkatkan daya saingnya untuk bisa berkompetisi secara terbuka di pasar global atau mati sama sekali.

menunjukkan juga adanya aspek budaya lainnya, yaitu budaya material (misalnya: kapital, input fisik dan prasarana fisik). Dalam kenyataan di lapangan banyak dijumpai bahwa perhatian terhadap budaya material ini dalam pelaksanaan program pembangunan relatif lebih besar, dan sering kali lebih diutamakan. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika di masa lalu banyak dijumpai bahwa dalam kegiatan pemberdayaan (ekonomi) masyarakat pertanian banyak yang mengalami kemacetan dan bahkan kegagalan.

Upaya perekayasaan atau pemberdayaan masyarakat pertanian kita hingga kini masih belum ditangani secara komprehensif. Pemberdayaan (ekonomi) masyarakat pertanian dapat dipandang sebagai upaya percepatan transformasi peradaban ekonomi masyarakat pertanian setempat, dari yang semula lebih mencerminkan ciri tradisional subsistem ke arah ciri modern-komersial-industrial. Ini berarti bahwa aspek budaya non-material atau aspek sosio-budaya perlu juga mengalami percepatan transformasi dari yang berciri terbelakang ke arah ciri kemajuan. Aspek sosio-budaya yang erat kaitannya dengan proses pemberdayaan atau upaya peningkatan kinerja atau "daya saing" (ekonomi) masyarakat pertanian adalah:

1. Organisasi dan kelembagaan kemitraan agribisnis pertanian rakyat yang sehat. Indikator sehatnya organisasi ekonomi masyarakat pertanian antara lain mencakup: adanya konsolidasi antar cabang agribisnis pertanian, integrasi antar cabang agribisnis pertanian, interdependensi antar pelaku agribisnis

Kekuatan daya saing pertanian kita perlu dibangun di atas landasan tatanan sosio-budaya yang bisa lebih menjamin terwujudnya sistem pertanian tradisional kita yang tangguh secara berkesinambungan.

pertanian dan iklim usaha yang dibangun (mencakup penegakan praktek persaingan usaha yang sehat dan pencegahan praktek monopoli, kemudahan usaha, kepastian hukum dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan setempat yang bersih dan berwibawa).

2. Kompetensi sumberdaya manusia (SDM) yang dicirikan oleh SDM yang memiliki daya respon yang tinggi terhadap dinamika pasar dan tuntutan hidup yang lebih baik. Kompetensi ini dicirikan oleh penguasaan pengetahuan riil dan fungsional yang terkait dengan peningkatan nilai tambah sumberdaya pertanian atau sumberdaya ekonomi yang bisa diakses oleh sistem masyarakat pertanian setempat. Perhatian pada SDM golongan muda juga perlu mendapat penekanan khusus,

sebab pada gilirannya SDM inilah yang menjadi pemilik masa depan kemajuan ekonomi setempat.

3. Sistem manajemen penyelenggaraan usaha pertanian yang berbasis sumberdaya lokal yang berciri futuristik (antisipatif ke arah kemajuan dan berdaya saing tinggi). Indikator keunggulan sistem manajemen ini

ditekankan pada aspek pengambilan keputusan, yang mengacu pada sejauh mana aspek keterbukaan (*transparency*), prinsip demokrasi atau keterwakilan (*representativeness*), tanggung gugat (*accountability*), *rationality* dan *good governance* ditegakkan dalam sistem pengambilan keputusan secara kolektif.

4. Sistem nilai (individu maupun kolektif)

Perspektif Kelembagaan Kelompok Tani yang Berdaya Saing

No.	Kriteria Masing-masing Pilar	Tradisional	Pemerintahan	Rasional Ekonomi	Ideal
1.	Leadership				
	a. Visioner	2-4	1-2	2-3	5
	b. Solidarity Maker	2-4	1-2	1-3	5
	c. Inspirator	2-4	1-2	1-3	5
2.	d. Core of Competence	1-2	2-3	1-5	5
	Organisasi				
	a. Interdependensi/simetris	1-4	1-2	1-3	5
	b. Konsolidasi	2-4	2-4	2-3	5
3.	c. Integrasi	1-3	1-2	1-4	5
	Manajemen				
	a. Accountability	1-4	1-2	2-4	5
	b. Rational	2-3	1-2	2-4	5
4.	c. Transparency	1-4	1-2	1-4	5
	d. Demokrasi	1-4	1-2	1-3	5
	Tata Nilai				
	a. Etos Kerja	2-5	1-3	2-4	5
5.	b. Gaya Hidup	1-4	1-2	2-4	5
	c. Sistem Moral	2-5	1-3	2-3	5
	SDM yang handal	1-3	2-4	2-5	5

Keterangan skor: 1 = sangat lemah 2 = lemah 3 = sedang 4 = kuat 5 = sangat kuat

ETOS KERJA DAN DAYA SAING

Etos kerja adalah komponen penting untuk membantu pencapaian daya saing kelompok tani. Etos kerja yang tinggi diindikasikan oleh sifat suka bekerja keras, rajin, produktif, kompetitif dan dibarengi dengan gaya hidup hemat. Selain itu juga dituntut sikap ilmiah, rasional dan sistematis dalam bekerja, sehingga dapat diperoleh tingkat efisiensi pribadi maupun efisiensi sistem yang tinggi serta inovatif terhadap hal-hal baru.

sebagai penggerak kemajuan ekonomi masyarakat pertanian setempat yang cirinya diarahkan pada sampai sejauh mana penghargaan terhadap nilai kerja keras, kerajinan, cara hidup hemat, cara kerja produktif (efisien), malu (dan harga diri) jika berbuat salah atau curang, sistem kerja yang kompetitif dan menghargai prestasi, adaptif terhadap inovasi (dari manapun datangnya), daya empati tinggi, cara kerja terorganisir dan sistematis, cara berpikir rasional dan menggunakan visi (jangka panjang yang jelas).

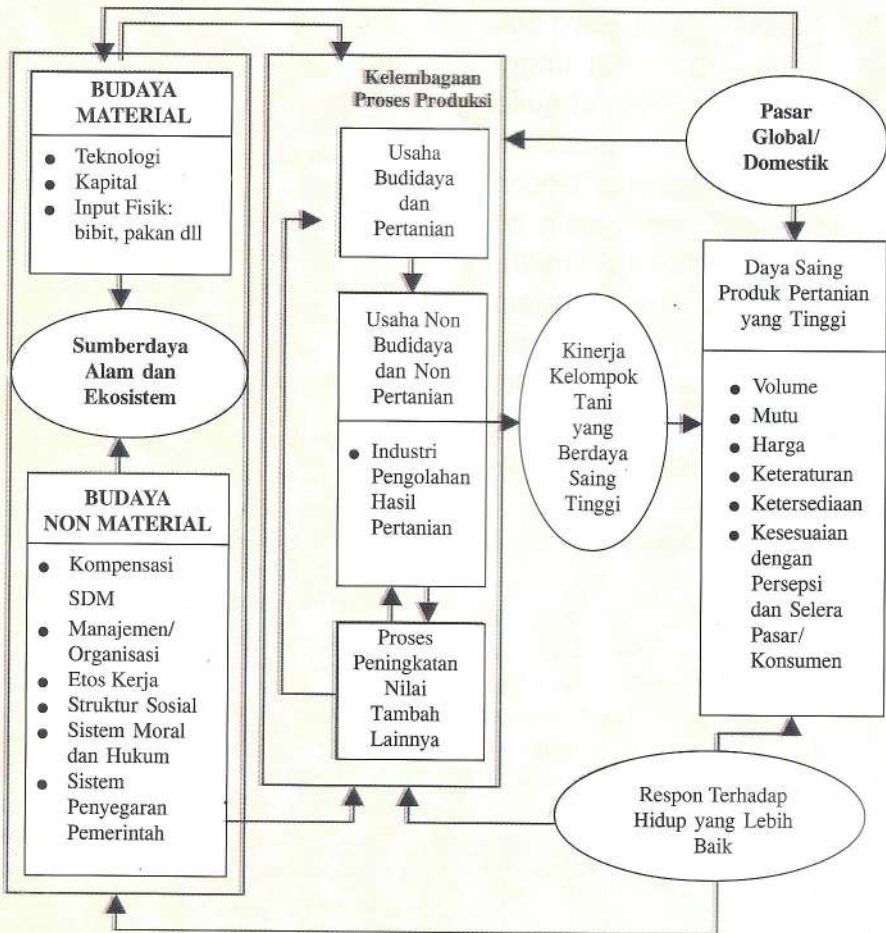
5. Struktur sosial yang terbentuk berdasar pada tatanan sosial yang lebih menjamin terwujudnya sistem ekonomi yang berdaya saing tinggi dan berkeadilan, yang cirinya adalah membentuk tatanan sosial yang diferensiatif dan berspesialisasi berdasar bidang keahlian pekerjaan.
6. Kepemimpinan kelompok (sosial) yang dapat diandalkan. Aspek kepemimpinan yang mencirikan dapat mendorong kemajuan daya saing ekonomi masyarakat pertanian antara lain, mencakup adanya tokoh yang diakui masyarakat setempat berdasar keunggulan sifatnya dalam aspek kemampuan menggalang kebersamaan (*solidarity maker*) dan saling percaya (*building trust*), menggerakkan masyarakat secara inspiratif (*inspiring*), mampu memberi contoh dalam berinvestasi dan beretos kerja altruistik (*altruisme*) untuk kemaslahatan bersama, memiliki keunggulan di bidang penguasaan keilmuan atau teknologi terkait dengan pengembangan usaha pertanian setempat dan memandu dalam menegakkan cara kerja profesional.

Upaya peningkatan nilai tukar produk pertanian masyarakat pertanian setempat harus dipandang sebagai salah satu hasil akhir dari peningkatan kinerja atau pemberdayaan ekonomi masyarakat pertanian setempat, terutama dilihat dari penguatan aspek sosio-budayanya. Keenam faktor di atas adalah sekumpulan dari aspek sosio-budaya yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat pertanian yang dimaksud. Kecuali butir (5), kelima aspek

sosio-budaya lainnya dapat dijadikan titik tolak pemberdayaan yang dimaksud.

Untuk lebih memperjelas bahasan berikut disajikan secara skematis di bawah

ini, diharapkan bisa memberikan gambaran lebih nyata tentang aspek sosio-budaya dan peningkatan daya saing pertanian “tradisional”.(Aa).



Pengembangan daya saing kelompok tani dengan memperhitungkan aspek sosial budaya setempat.

Orientasi Pembangunan Pertanian dan Penyuluhan

Mengacu Kepada Pola Penumbuhan Kemandirian Petani

BERPANGKAL pada kemandirian maka untuk sampai kesana perlu disiapkan sarana dan prasarannya, agar petani bisa mandiri. Hal ini meliputi SDM Petani, tata aturan perundang-undangan bidang pertanian/ agraria, wadah organisasi petani, sampai alat-alat penunjang produksi dan OF FARM, ON FARM sampai industri hilirnya (agribisnis).

Pertanyaannya kini siapa yang menyiapkan itu semua? Kalau diserahkan semua kepada pemerintah ini juga tidak mungkin. Oleh sebab itu perlu ada kerja sama dari semua dari semua unsur terkait dengan *political good will*, tanpa rasa curiga dan sangka buruk.

Masing-masing institusi baik pemerintah, wakil rakyat, organisasi petani dapat bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif terprogram terencana jelas visinya dalam menelurkan program kebijaksanaan pembangun pertanian berpihak kepada petani berbasis ekonomi kerakyatan di pedesaan, langkah percepatan ini sudah diakomodasikan pada OTODA UU 22/ 1999, sesuai dengan geografis negara agraris maka untuk membina kemandiran

petani perlu dikenali dulu tata aturan dasar agraria lewat program pembaharuan agraria dan distribusi lahan secara layak dan adil kepada petani minimal rata-rata 2 - 3 Ha/ KK.

Selanjutnya perlu dibenahi juga secara perbaikan bagi petani agar ada Bank yang betul-betul berpikul kepada petani bisa berupa Bank Tani atau BPD yang ada, dan

terakhir mungkin mengenai tata ekonomi pedesaan melalui koperasi yang baik. Sebab ketiga hal dasar pokok ini dalam reformasi masih ketinggalan/belum tersentuh. Koperasi masih menggunakan pola lama dimana anggotanya dalam koperasi masih seragam (tidak boleh campuran dari berbagai profesi) dan kepengurusan di DEKOPIN masih dido-

minasi dari induk koperasi KBA (tercatat ada 5 induk koperasi KBA), INKOPOL, INKOPAD, INKOPUL, INKOPAL, INKOPAU dan INKOVERI.

Sementara KUD hanya ada INKUD dan PNS dari 17 Departemen hanya punya 1 IPKN. Ketimpangan ini juga perlu diperbaiki agar perkoperasian dapat berwatak kerakyatan dan tidak dipolitisir untuk

Pertanyaannya
kini siapa
yang
menyiapkan
itu semua?

kepentingan politik/bisnis yang ujung-ujungnya meminta jatah *kue* pembangunan lebih besar kepada groupnya dan merugikan komoditas petani yang mayoritas.

Di sisi lain perlu diciptakan serta komoditas unggulan daerah/distrik yang didukung dana perbankan dengan bunga rendah 4-6% dan masa bayar minimal 3-5 tahun dengan demikian pola KUT 10,5% masa angsur 1 tahun yang selama ini justru mencekik petani tidak lagi terjadi. Disamping itu perlu dihilangkan diskriminasi pelayanan KUT yang selama ini hanya untuk palangung dan hortikultura agar disebar merata untuk semua komoditas pertanian secara rasional dengan skim kredit yang sesuai dengan teknis budidaya/usaha tani komoditas tersebut.

Pembinaan SDM merupakan tanggung jawab bersama baik dari pemerintah maupun/masyarakat tani yang ada. Karena pemerintah melalui penyuluhan dan jajarannya/Penyuluh Pertanian Lapangan menitikberatkan pada teknis pertanian, maka sebaiknya petani secara politis belajar untuk menguatkan posisi sehingga tidak mudah dijadikan objek pembangunan/diskooptasi melainkan timbul kesadaran politik petani berbangsa dan bernegara. Tahu akan hak dan kewajibannya, karena itu wadah Organisasi Massa petani itu haruslah non partisan dan independen.

Dengan demikian petani dapat memainkan peran yang signifikan di Republik ini, sebab petani juga merupakan motor dan pelaku pembangunan, pelaku perubahan menuju kemandirian sendiri. Melalui kebijakan reformasi agraria, reformasi perbankan dan reformasi koperasi. Hal ini hanya dapat tercipta lagi

kalau ada *political good will* perbankan pemerintah dan kerjasama yang baik dan serasi semua institusi yang terkait di dalamnya. Hal ini dipandang sudah sangat mendesak dan menjadi prioritas Otda. Sebab apabila hal ini tidak berjalan baik maka yang terjadi bukan topik di atas melainkan teknologi penyuluhan pertanian terbentur oleh kebijakan sehingga petani kita tetap tertinggal 30 tahun dari para tetangga kita Thailand dan Malaysia seperti yang dialami ini.

Tanda-tanda tersendatnya tujuan topik di atas sudah mulai sejak ditetapkannya kebijakan pertanahan kembali ke pusat. Masih ada kesan pemberian kekuasaan wilayah tanpa ada menilik tanah. Otda tanpa kekuasaan pembaharuan agraria sebagai dasar pembaharuan pertanian. Semoga hal ini ada solusi akhir yang baik bagi dunia pertanian, ditunggu oleh seluruh insan tani di seluruh Indonesia.

Pola pikir penumbuhan kemandirian petani agar berjalan dengan baik, maka ketiga unsur di atas menjadi syarat utama, maka untuk itu rekomendasi ketiga pokok masalah perlu diupayakan terlebih dahulu untuk tempat tumbuhnya kemandirian petani. Tanpa itu semua hanya ada retorika belaka dan timbullah istilah teknologi pertanian terbentur kebijakan yang akhirnya malah dipolitisi menjadi menganalisisasi dan pembodohan petani secara struktural berdasarkan teknologi melulu tanpa kemandirian itu secara hakiki. (Sb)

(Kusnum, PPL BPP Arung-Arang,
BIPP Muara Jambi).

Kepedulian Bupati Donggala

Diklat Penyetaraan D.III Bagi Penyuluh Pertanian

PEMBANGUNAN pertanian di Kabupaten Donggala dititik beratkan pada dua Kebijakan Pembangunan Pertanian yang berorientasi pada Ketahanan Pangan Keluarga, Daerah dan Nasional.

Dari kedua kebijaksanaan Program Pembangunan Pertanian tersebut dalam era globalisasi dewasa ini, maka kita akan dihadapkan pada berbagai masalah diantaranya adalah masalah Penyuluhan dan Penyuluh itu sendiri.

Permasalahan di bidang Penyuluhan Pertanian yang sangat mendasar seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi adalah kualitas Sumberdaya Penyuluh Pertanian yang dipandang perlu untuk terus ditingkatkan.

Untuk betapa strategisnya peran Penyuluh Pertanian sebagai pejabat fungsional, dimana mereka dituntut suatu kualifikasi yang memadai baik dari aspek intelektual maupun emosional dalam melaksanakan fungsi dan perannya secara profesionalisme.

Dengan dikeluarkannya SK. Menko-wasbangpan Nomor: 19/Kep/MK.Waspan/5/1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, dimana ditetapkan bahwa Penyuluh Pertanian yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dasar pendidikan SLTA/SPMA harus disesuaikan tingkat pendidikannya setara minimal D.III di bidang pertanian.

Atas dasar kebijaksanaan tersebut dan memahami bahwa Penyuluhan Pertanian sebagai salah satu urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka kini mulai tahun 2000 secara bertahap Kabupaten Donggala akan melaksanakan pendidikan Penyetaraan D.III bagi seluruh Penyuluh Pertanian Kabu-

paten Donggala yang telah diangkat hanya dengan dasar pendidikan SLTA/SPMA selain membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyuluh pertanian untuk mengikuti pendidikan atas biaya sendiri bagi yang sanggup, pada jenjang/pendidikan D.III maupun S1.

Permasalahan yang sangat mendasar adalah meningkatkan kualitas Sumberdaya Penyuluh Pertanian

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan seperti ini cukup akan memakan biaya yang cukup mahal, namun pemerintah Daerah akan berupaya untuk tetap melaksanakannya, mengingat alokasi dana yang cukup mahal ini, maka diharapkan kepada para PPL selaku peserta dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan dari pendidikan dapat kita capai.

Pembangunan Pertanian dewasa ini akan dimasa mendatang adalah pembangunan pertanian yang berdimensi kerakyatan yang dirancang sedemikian rupa sehingga berakhir di petani dan berawal dari petani (Botton Up Farming), komitmen pada prinsip atau metode pembangunan sebagai komponen pemberdayaan petani, sungguh menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan.

Dalam konteks ini maka penyuluhan pertanian pada hakekatnya adalah sistem pendidikan luar sekolah bagi pembangunan perilaku petani dan keluarganya agar mereka dapat memahami dan memiliki kemampuan serta kesempatan dalam mengelola usahataniya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Menyimak apa yang diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa peranan Penyuluh Pertanian adalah sangat strategi dan sejalan dengan Visi Gerakan Mandiri Membangun Desa (GEMA-BANGDESA) yaitu masyarakat Desa yang mandiri, sejahtera yang berkelanjutan dan berketahanan Tangguh, serta dengan Misinya yaitu Memberdayakan Masyarakat di pedesaan secara terpadu dan menyeluruh menuju desa mandiri dan sejahtera.

Sebagai salah satu urusan yang telah diserahkan dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dikembangkan sesuai dengan perubahan orientasi Pembangunan Pertanian khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya, dengan tetap berpedoman pada UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan utama pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka reorientasi Penyuluh Pertanian, maka komponen yang sangat strategi adalah penataan dan pengembangan profesionalisme Penyuluh Pertanian yang pada prinsipnya jadi; Penyuluh sebagai petugas profesional yang mandiri dan berkeahlian spesifik.

Untuk dapat berperan dengan posisi tersebut di atas maka peserta penyettazione D.III dituntut untuk memiliki kualifikasi intelektual tertentu dapat diperoleh melalui sistem pendidikan dan pelatihan keahlian seperti ini.

Untuk itu diharapkan kepada peserta kirannya dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti Diklat ini sehingga apa yang kita harapkan akan dapat tercapai.

Mengakhiri arahnya Bupati Donggala H.N. Bidja S. Sos menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak utamanya Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian, Kepala BLPP serta para Akademisi Universitas Tadulako yang telah mendukung atas terselenggaranya Diklat Penyettazione D. III bagi Penyuluh Pertanian Donggala, seraya mohon Ridho Allah SWT, Amin. (Sb)

*(Tugiran,
PP Donggala Selatan)*

Yatti (Penyuluh Pertanian): Penyuluh Tidak "Tidur"

Baru-baru ini saya juga mendengar berita itu dari majalah, yang menyatakan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) itu 50% tidur. Ibu Yatti juga sangat kaget dan terperangah. Mendengar hal tersebut, kok seperti itu gambaran PPL. Sementara PPL, pada saat ini sangat sedang berduka. Karena PPL ini adalah pegawai pusat yang dipekerjakan di daerah. Setelah adanya Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) justru PPL dengan harapan diberikan secara baik kepada Pemda. Malah ada, berita PPL tidur 50%. Jelas orang daerah ketakutan kalau, melihat gambaran penyuluh seperti itu. Akan tetapi sebelumnya tidak demikian, mungkin survey dari Bapak Margono itu, melihatnya hanya sepiantas. Karena PPL sendiri bukan orang kantoran.

Memang diceritakan, pernah berkunjung pada sebuah BPP, yang punya PPL jumlahnya 10 orang. Yang hadir hanya 2 orang, yaitu Kepala BPP sebagai koordinasi PPL, dan yang satu lagi tatasuasahannya. Biasanya PPL datang ke BPP pagi hari, dan sesudah itu

PPL pergi ke wilayah binaan masing-masing. Ataupun PPL ini mempunyai kegiatan sore. Karena petani tidak mau diganggu pekerjaannya pada pagi hari. Hanya sebagian kecil PPL bekerja pagi hari untuk melakukan demo. Kadang-kadang PPL melaksanakan penyuluhan pada sore dan malam hari. PPL itu kerjanya 24 jam dan hal ini tidak bisa diukur. Tugasnya seperti dokter saja. Kadang-kadang, kapan saja PPL itu dibutuhkan petani dan datang sendiri ke PPL. Dalam hal ini PPL tak bisa menolak. Apalagi pada waktu "serangan hama wereng dan tikus", hujan gede di lapangan. Petani panik, yang terpikir bagi petani hanya PPL. Pada waktu itu, petani tidak memikirkan, apakah PPL itu



Bersama petani dan rekan kerja (Hh)

tidur atau sakit. Petani pasti datang ke PPL. Maksudnya meminta bantuan pemecahannya bagaimana. Karena petani menganggap PPL paling tahu segala-galanya. Makanya kalau PPL dibilang tidur, PPL yang bagaimana? Dan dimana? Kata Ibu Yatti yang PPL itu.

Semenjak diberi SK (Surat Keputusan) PPL itu sudah dikenalkan dengan petani dan kelompok tani.

Bukti-bukti PPL masih eksis di era otonomi ini ialah :

- 1) Kelompoktani masih eksis (terbina dengan baik)
- 2) Hasil produksi meningkat.
- 3) Kegiatan PPL masih terarah di lapangan. Misal: pola varietas tanam masih teratur.
- 4) Penanaman varietas masih serentak.

Tanpa PPL kayaknya tak mungkin mendapatkan kekompakan di lapangan, karena petani mempunyai ego masing-masing. Dengan bukti kehadiran PPL di lapangan, mereka (petani) kompak di lapangan.

Dengan eksisnya KTNA, tak lepas dari dukungan PPL sendiri. Alhamdulillah, petani tak seburuk seperti dulu. Karena sesuai dengan paradigma sekarang tidak hanya meningkatkan produksi. Usahatani juga mengejar keuntungan.

Jadi sekarang PPL memberikan rekomendasi kepada kelompoknya tidak asal saja. Makanya, perlu ditingkatkan pengetahuan PPL, studi banding, latihan, maksudnya untuk membantu petani mencari peluang-peluang.

Bukti lainnya di wilayah binaan ibu Yatti. Dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu

petani yang dibinanya mempunyai rumah gubuk. Dindingnya tadih, lantainya tanah. Tapi sekarang coba lihat, rumah itu punya dinding terbuat dari tembok dan lantainya sudah ubin/semèn.

Itu adalah berkat hasil kerja tani di sawah dan hasil jerih payah istri petani sebagai buruh "batik".

Untuk meyakinkan lebih lanjut, PPL itu tidak tidur dan dibutuhkan.

Penulis oleh kepala KPP Cirebon bersama Ibu Yatti dibawa ke wilayah binaan yang pernah menjadi binaan yatti antara lain :

- 1) Ke Desa Kalibaru, Kecamatan Cirebon Barat.
- 2) Desa Pajajagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon.

Dari wawancara langsung dengan ketua kelompok tani, anggota KTNA, petani dan pengamat hama yang menyatakan sebagai berikut :

1. PPL/ Penyuluh Pertanian Lapangan itu adalah merupakan teman berunding petani, kelompoktani mengenai apa yang akan dilaksanakan oleh petani. "Oleh karena itu bila ada yang mengatakan PPL itu tidur adalah tidak benar".
2. PPL itu tempat menampung keluhan petani dan juga sebagai jembatan untuk menyampaikan keluh kesah petani antara lain, bila harga pupuk dan obat-obatan mahal. Oleh karena itu kami petani, kelompoktani sangat membutuhkan PPL. Kelompoktani sudah merasakan hasil binaannya dengan mencoba teknologi baru pada varietas Cisantana dengan hasil panen 5 sampai dengan 6 ton per musim.

oleh karena itu ada yang mengatakan PPL tidur tidak setuju.

3. Penyuluh Lapangan (PPL) bertugas tidak kenal waktu, kadang bertugas sore dan malam hari bila diperlukan petani datang ke rumah. Kadang-kadang petani tak mengerti apakah PPL itu sakit atau capek. Yang penting petani ini ingin mencurahkan dan menyampaikan permasalahannya. Antara lain menyampaikan serangan hama tikus, hama wereng dan sebagainya pada wilayah binaannya yang sangat luas itu.
4. Selain itu aparat desa mengatakan bahwa butuh PPL, karena banyak yang dirundingkan dengan PPL antara lain memasarkan padi, mencari informasi bibit, pupuk dan obat-obatan. "Mereka mengumpamakan "PPL itu ibarat tanaman dengan air". Tanpa air tanaman akan mati, bila ada PPL hasilnya pun meningkat.
5. PPL ini selalu ditunggu kedatangannya oleh petani. Dan PPL selalu peduli pada petani, kelompoknya. Bila ada yang menyatakan PPL itu tidur adalah **provokator**.

Begitulah pernyataan dan ungkapan dari petani, ketua kelompok maupun PPL yang ada di Kecamatan Cirebon Barat, dan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Yang disaksikan sendiri oleh Bapak Ir. Ali Effendi sebagai Kepala KPP (Kantor Penyuluh Pertanian) dan Ibu Yatti Nuryatti

yang telah bertugas sebagai PPL di Cirebon Barat dan sekarang sudah dialih tugaskan ke KPP Kabupaten Cirebon mulai 5 Januari 2001.

Prospek Hidup PPL

Dengan adanya Otonomi Daerah) menurut Ibu Yatti prospek hidup Penyuluh Lapangan (PPL) akan cerah, karena sudah ada pengakuan dari pemerintah daerah, terhadap existensi kinerja penyuluh. Hal ini dapat dibuktikan pada lembaran daerah Kabupaten Cirebon Nomor 39 tahun 2001 seri D 36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 37 tahun 2001 tentang "Pembentukan Kantor Penyuluh Pertanian tanggal 7 Maret tahun 2001". Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 tahun 1997 tentang pembentukan BIPP (Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian)

dinyatakan tidak berlaku.

Dengan sudah adanya pengakuan Pemda terhadap penyuluh, DOLOG sekarang juga sudah mau kerja sama membeli gabah dari petani. Sebelumnya hal ini bermasalah. Kita menganjurkan petani berproduksi semaksimal mungkin. Sementara waktu, kita kesulitan bermitra dengan DOLOG.

Selain itu DOLOG sudah membuka diri dengan adanya penyuluh pertanian mempunyai satu wadah, yaitu KPP (Kantor

Bila ada yang
menyatakan PPL
itu tidur adalah
PROVOKATOR

Penyuluh Pertanian).

Kegiatan yang sudah dirintis penyuluh ialah mengadakan kemitraan dengan petani dan kelompok tani lain dengan CV. Rastra Utama, CV. Wonder Indo Pratama. Kegiatan antara lain, membantu petani yang tak terjamah oleh pemerintah serta membantu memberikan pupuk dengan pembayaran *system yarnen* (pembayaran setelah panen). Pengusaha ni melakukan nego dengan KPP, BPP dan melibatkan PPL.

Selain itu, pengusaha bila ingin menguji pupuk dan obat-obatan, teknologi baru, diharuskan melalui KPP dan penyuluh lapangan. Hal ini tidak boleh langsung ke petani sebab pengusaha maunya cari untung. Dan tidak memperhitungkan cocok atau tidak bagi petani. Sedangkan KPP adalah lembaga penyuluh dan PPL bertugas memikirkan kepentingan petani. Begitulah PPL merasa cukup dihargai dan dibutuhkan oleh petani. Jadi untuk mewujudkan penyuluh menjadi konsultan, itu kan “angan-angan”. Mudan-mudahan hal ini terwujud di Otoda (Otonomi Daerah) ini.

Tugas dan fungsi PPL, masih mengikuti yang lama antara lain :

- a) Mengusahakan sarana produksi
- b) Merubah sikap dan perilaku petani
- c) Mencarikan peluang pasar
- d) Membantu dalam menerapkan teknologi baru

Sekarang penyuluh dituntut untuk mencarikan peluang pasar. Penyuluh tidak asal “ngomong saja” pada petani, karena petani sudah **reformasi**. Kalau mau menyuluhkan suatu produk, penyuluh harus mampu mencarikan peluang pasarnya.

Rasa-rasanya PPL ini terasa butuh

eksistensinya, pengakuannya keberadaannya dengan adanya Otoda (Otonomi Daerah). Karena segalanya semua tertuju pada daerah. Terutama masyarakat bawah, petani dan PPL dulunya tak begitu, biasa-biasa saja. Kata Ibu Yatti dengan tersenyum.

Sebagian PPL punya kegiatan sendiri-sendiri antara lain ada yang bertani, mengusahakan budidaya ikan di kolam air tawar, penggemukan domba.

Untuk ini Ibu Yatti juga mencoba untuk diri sendiri yaitu usaha pemeliharaan ayam buras. Ternyata tak mudah berusaha itu, kita haris “ulet dan tekun”.

Setelah Otoda ini Ibu Yatti sudah mendapatkan Surat Keputusan tanggal 5 Januari tahun 2001. Terhitung mulai 1 Januari tahun 2001 sudah dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil daerah pada Pemda Kabupaten Cirebon yang ditanda tangani atas nama Kepala Kepegawaian Negara Kepala Kantor Regional III Bandung dengan pangkat Penata III/c. Karena prestasi, Ibu Yatti, pada saat ini oleh pimpinan diangkat dan ditempatkan di kantor penyuluhan Pertanian Kabupaten Cirebon.

Sebagai seorang PPL Ibu Yatti juga ingin mencoba usaha sendiri, yaitu beternak ayam buras petelor (jenis ayam kampung). Kebutuhan pasar akan telur terus meningkat. Mereka fanatik membeli telur dari Ibu Yatti. Mula-mula memelihara 200 ekor, ternyata hasil telah terserap pasar, dicoba lagi memelihara 300 ekor, ternyata terserap pasar juga, sekarang malahan memelihara 500 ekor dan masih terserap juga dan rencana Ibu Yatti akan me-



Bersama suami tercinta (Hh)

melihara sampai 1000 (seribu) ekor. Pembeli datang sendiri ke rumahnya dan membayarnya secara cash. Pembeli telur itu mengeksport telur tersebut ke luar negeri yaitu ke Singapura.

Sekarang Ibu Yatti “menetaskan sendiri ayam kampung itu. Karena bila membeli di pasar, “tidak terjamin keunggulannya”. Lamanya menetas 21 hari dengan alat penetas. Penetasan ini waktunya juga sama dengan penetasan biasa. Sekarang Ibu Yatti menetaskan telur 140 butir per minggu. Selain itu Ibu Yatti juga “menyilangkan” sendiri ayam kampung itu. Dengan maksud ayam betina dilanjutkan jadi ayam petelur dan ayam jantan dijual ke pedangang ayam bakar. Umur 10 minggu ayam jantan (pedaging)

dapat dipasarkan. Jadi Ibu Yatti ingin punya dua kegiatan yaitu menjual telur dan menjual dagingnya.

Untuk afkirnya dijual dagingnya. Ayam buras efektif produksinya sampai 2 tahun. Setelah dua tahun produksi telur menurun ayam-ayam itu sudah tua dan besar. Dan Ibu Yatti menjualnya pada saat Hari Raya Idul Fitri, karena dengan harapan semua orang pasti

bikin opor ayam untuk makan ketupat. Walaupun orang tak punya, waktu itu pasti menyembelih ayam, untuk buat opor. Pada saat itu harga ayam tinggi. Sekali setahun Ibu Yatti panen dari ayam afkir, dan setiap hari panen dengan hasil telur, dan setiap 10 minggu Ibu Yatti dapat menjual ayam jantannya. Demikianlah cerita Ibu Yatti menceritakan pengalamannya sebagai pengusaha ternak ayam buras dan petelur serta pedaging. Mudah-mudahan usaha ini terus berkembang dan dengan pengalaman sendiri ini Ibu Yatti sebagai PPL dapat membagi pengalamannya kepada tani dari kelompok tani.

Pelatihan adalah salah satu metode penyuluhan, dan merupakan sistem pendidikan luar sekolah (non formal) di bidang pertanian untuk penyuluh, petani dan keluarganya. Agar dinamika dan

kemampuannya dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai penyuluh lapangan (PPL) Ibu Yatti yang sudah berumur ± 43 tahun itu. Sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yaitu: 1) Pelatihan orientasi PPL. 2) Pelatihan dasar PPL. 3) Pelatihan PHT Wereng Coklat. 4) Pelatihan UP GK. 5) Pelatihan Polivalen. 6) Pelatihan P4K. 7) Pelatihan Kewirausahaan. 8) Pelatihan TOT P4K Tingkat Nasional di Bogor.

Dengan bekal dari pelatihan ini Ibu Yatti memberikan pengetahuan dan menerapkan teknologi kepada petani dan kelompok tani. Sekarang dengan adanya Otoda, Pemda belum menyediakan biaya untuk latihan, mungkin masih baru atau mungkin ada di BPP lain.

Untuk mengatasi ini agar dapat mencari informasi pengetahuan baru, Ibu Yatti menambah ilmu sendiri dengan membaca "Sinar Tani" dan meningkatkan pengetahuan umum.

Pendidikan formal yang telah diikuti Ibu Yatti telah tamat SPMA tahun 1976 dan sekarang dalam usia menjelang senja ini (43 tahun) melanjutkan kuliah pada Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI), Jurusan Sosek. Sekarang sedang menyusun Laporan Tugas Akhir Semester VIII (Program S1). Selamat buat Ibu Yatti, semoga cepat diwisuda dan sukses selalu.

Suka duka yang dialaminya selama menjalankan PPL, ialah pada tahun 1986,

kelompok tani dan yang dibina oleh Ibu Yatti di Kecamatan Plumbon, pernah menanam kedelai varietas "Lumajang Bewok", produksinya bagus sekali.

Dengan hasil 1,8 ton/Ha/4 bulan satu musim, di waktu itu petani binaannya 2 kelompok dan tiap kelompok anggotanya 10 petani.

"Keberhasilan petani adalah kebanggaan penyuluh juga", karena PPL merasa satu. Demikian cerita Ibu Yatti mengenang masa lalu.

**Keberhasilan petani
adalah kebanggaan
penyuluh juga**

Dukanya selama jadi PPL yaitu, petani binaannya mengalami kegagalan panen yang disebabkan padinya di sawah diserang hama wereng coklat dan hama/virus rumput kerdil, pada tahun 1995. Upaya yang dilakukannya ialah minta bantuan obat-obatan dari Dinas Tanaman Pangan, karena di waktu itu status PPL di bawah Dinas Tanaman Pangan.

Selain pelatihan-pelatihan yang didapat sebagai penyuluh lapangan, Ibu Yatti pernah mengikuti studi banding tahun 1996, melalui Proyek P4K ke luar negeri.

Lamanya studi banding di luar negeri selama 2 minggu, studi 1 minggu di Thailand dan 1 minggu di Malaysia. Hasilnya ialah telah diterapkan **kemitraan**. Sebelumnya kelompok tani belum bermitra dengan pengusaha, sedangkan di Thailand dan Malaysia petani telah berasosiasi dengan pengusaha.

Alhamdulillah setelah dicoba kemitraan. Hasil produksi oleh dan kelompok tani berhasil, kata Ibu Yatti yang janda dari Bapak Ideng Rusadi, pensiunan Dinas Perkebunan. (Hh)

PENAS X – AGRIBISNIS 2001

Citra Aktualisasi Diri Petani–Nelayan Mandiri

PENAS atau Pekan Nasional Pertemuan Kontaktani-Nelayan merupakan salah satu forum pertemuan atau tempat kegiatan belajar mengajar petani-nelayan dengan harapan dapat membangkitkan semangat, tanggung jawab, kemandirian dan pengembangan diri agar dapat berpartisipasi secara proaktif selaku subjek utama pembangunan pertanian. Sampai saat ini forum Penas masih tetap relevan karena memang manfaatnya sangat dirasakan oleh Petani-Nelayan sebagaimana semboyannya dari petani oleh petani dan untuk petani. Semboyan ini masih tetap dipegang teguh dari Penas I/1971 Cihea-Jawa Barat sampai dengan Penas X/2001 Tasikmalaya yang akan datang.

Berdasarkan semboyan itu pula, kelompok KTNA Nasional telah menetapkan berbagai tema PENAS yang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional pertanian Indonesia dari waktu ke waktu, yaitu:

- (1) **PENAS I/1971**, Cihea, Jawa Barat dengan tema : *"Meningkatkan peranan petani-nelayan dalam program pembangunan pertanian untuk petani oleh petani"*;
- (2) **PENAS II/1978**, Wringintelu, Jawa Timur, dengan tema : *"Meningkatkan Partisipasi Petani-Nelayan Dalam Melaksanakan Pelita II"*;
- (3) **PENAS III/1980** Sempidi, Bali dengan tema: *"Keserasian Kegiatan-kegiatan Pembangunan Usahatani dan Usaha Nelayan dengan Kesempatan Kerja dan pendapatan keluarga dengan peningkatan gizi dan makanan rakyat dengan kelestarian lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam"*;
- (4) **PENAS IV/1981**, Tawid, Kalimantan Selatan dengan tema: *"Tingkatkan Produksi dan Pengadaan Pangan bagi Kesejahteraan Bangsa dan Umat Manusia"*;
- (5) **PENAS V/1983** Probolinggo, Lampung dengan tema : *"Meningkatkan Kemampuan peranan dan peran serta petani-nelayan sebagai upaya untuk mencapai pertanian tangguh"*;
- (6) **PENAS VI/1986**, Simalungun, Sumatera Utara dengan tema : *"Mewujudkan petani-nelayan tangguh dalam men-sukseskan lepas landas pembangunan pertanian melalui peranan Kontaktani-Nelayan dalam Kelembagaan Ekonomi"*



Pedesaan yang Sehat dan Kuat”;

- (7) **PENAS VII/1988**, Maros, Sulawesi Selatan dengan tema :”*Memantapkan Keterpaduan Kelompoktani Nelayan dan KUD untuk Mewujudkan Petani Tangguh dan Keluarga Sejahtera*”;
- (8) **PENAS VIII/1991**, di Mungkid-Magelang Jawa Tengah dengan tema :”*Dengan Semangat Penas VIII-Pertasi-kencana 1991, Kita Mantapkan Petani-Nelayan Tangguh, KUD Mandiri dan KB Mandiri yang Berwawasan Lingkungan guna Mewujudkan Keluarga Sejahtera*”;
- (9) **PENAS IX/1996**, Gerung - Nusa Tenggara Barat dengan tema :”*Melalui Agribisnis, Koperasi Mandiri dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kita Tingkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Upaya Pengentasan Kemiskinan*”

PENAS X - Agribisnis 2001 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20-25 Oktober 2001 di Tasikmalaya- Jawa Barat, memilih tema “*Melalui Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Kita Tingkatkan Kesejahteraan Petani-Nelayan*”. Sekretariat KTNA Nasional/PENAS telah mencatat data sementara jumlah peserta yang akan datang kali ini diperkirakan kurang lebih 12.000 petani-nelayan secara swadana berasal dari seluruh Indonesia. Mereka akan memanfaatkan wahana Penas sebagai ajang bertemunya para petani-nelayan dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri. Diharapkan PENAS X berlangsung penuh keakraban saling asih, asuh dan asah untuk mewujudkan citra

petani-nelayan Indonesia yang mandiri. Citra kemandirian petani-nelayan Indonesia tersebut harus terus ditumbuh-kembangkan di masa-masa yang akan datang. Paling tidak selama PENAS X mendatang ciri-ciri kemandiriannya sudah dapat ditunjukkan dalam berbagai kesempatan dan acara yang digelar pada waktu itu. Namun apa sebenarnya ciri-ciri kemandirian Petani-Nelayan tersebut. Pertanyaan inilah yang mendorong penulis untuk turut berpartisipasi dalam forum wacana Ekstensia kesayangan kita ini.

Menurut hemat penulis citra kemandirian petani-nelayan tersebut paling sedikit dapat dikemukakan penulis dalam lima ciri sebagai berikut :

Pertama : Citra Integritas Diri; Petani-nelayan Indonesia yang mandiri

Diperkirakan kurang lebih
12.000 petani-nelayan
secara swadana berasal
dari seluruh Indonesia.
Mereka akan me-
manfaatkan wahana
Penas sebagai ajang
bertemunya para petani-
nelayan dari berbagai
daerah bahkan dari luar
negeri.

terutama ditunjukkan oleh integritas diri yang tinggi terhadap profesi yang telah mereka pilih dan miliki selaku pelaksana utama pembangunan pertanian. Hal ini harus selalu terlihat dalam setiap gerak langkah usahatannya, mulai dari tingkat produksi, sampai pasca panen dan pemasaran.

Sebagai petani-nelayan mandiri, mereka harus selalu tersentuh hatinya atau nalurinya untuk meningkatkan dan mensukseskan usahatannya. Sikap ini tidak mengenal batas-batas, skala ruang dan waktu tertentu, sebaliknya harus dapat berlangsung dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam wahana PENAS.

Kedua : Citra Orientasi Fungsi ; Petani-nelayan mandiri tidak terikat pada aturan struktural/birokrasi, sebaliknya harus cenderung pada pelaksanaan fungsi tugas dan pekerjaan usahatannya. Kalau pada dekade sebelumnya petani-nelayan masih saja terlihat cenderung berorientasi kepada hirarkhi struktural yang ada, maka memasuki abad 20 atau era reformasi ini mereka tidak dapat menggantungkan nasibnya pada struktural semata. Sejarah membuktikan bahwa ternyata sektor pertanian adalah sektor yang paling handal dan mampu bertahan pada krisis ekonomi dan moneter dewasa ini. Oleh sebab itu, hal ini harus disadari dan dapat diaktualkan oleh petani-nelayan dalam kegiatan-kegiatan usahatannya, termasuk dalam fo-

Kemandirian petani-nelayan dapat juga berarti spesialisasi, sebab tanpa spesialisasi mereka akan sulit tumbuh dan berkembang.

rum PENAS X.

Ketiga : Citra Spesialisasi; Kemandirian petani-nelayan dapat juga berarti spesialisasi, sebab tanpa spesialisasi mereka akan sulit tumbuh dan berkembang. Spesialisasi dimaksud adalah terhadap cabang-cabang usahatani yang dipilih

dengan tetap berpegang teguh pada citra orientasi fungsi dan integritas diri tersebut di atas. Seorang atau sekelompok petani-nelayan harus mampu menguasai salah satu cabang usahatani yang diminatinya, misalnya mereka tetap pada spesialisasi cabang produksi saja, pasca panen saja, pemasaran saja atau cabang sarana produksi/permodalan. Berdasarkan spesialisasi-spesialisasi tersebut mereka harus dapat berkelompok secara komersil dalam merencanakan suatu jenis komoditi tertentu. Dalam skala makro, upaya spesialisasi ini dapat diperluas, sebagai upaya spesifik lokalita dalam wilayah administrasi tertentu, sebagaimana halnya apel Malang.

Keempat : Citra Kualitas; Jika petani-nelayan Indonesia ingin mandiri, citra yang tidak kalah pentingnya adalah citra kualitas. Mereka harus mampu mengaktualisasikan diri secara berkualitas. Sudah merupakan kenyataan umum, bahwa kalau ingin memenangkan persaingan, maka menangkanlah kualitas. Kualitas tersebut harus dapat terukur pada produk-produk yang dihasilkan dari usahatannya.

Tidak ada konsumen yang merindukan kualitas rendah, namun sebaliknya selalu mencari kualitas tinggi atau terbaik serta tersedia secara konsisten dan marketable. Hal ini dapat berlaku dalam skala lokal, regional, nasional maupun global.

Kelima : Citra Pengembangan Diri;

Pada dasarnya kemajuan/ kemandirian erat kaitannya dengan pengembangan diri. Demikian juga halnya dengan kemajuan/ kemandirian usahatani harus dicirikan oleh pengembangan diri secara terus menerus atau berkesinambungan dan menyeluruh (total).

P e n g e m b a n g a n dimaksud dapat berlaku dalam pengembangan kompetensi (pengetahuan/keterampilan/sikap); pengembangan skala usaha; pengembangan pasar dan pada akhirnya pengembangan kelembagaan usahatani. Lahir dan berkembangnya P4S merupakan salah satu

ciri aktualisasi diri petani-nelayan Indonesia dalam konteks ciri kelima ini. Demikian juga halnya wahana PENAS adalah dalam rangka pengembangan diri petani-nelayan Indonesia.

Agar kemandirian Petani-Nelayan tersebut dapat terwujud, maka kelima ciri citra tersebut di atas tidak dapat dipandang secara terpisah, tetapi saling terkait satu dengan lainnya. Dalam berbagai kesempatan PENAS X nanti, hal ini dapat diukur sampai sejauhmana citra aktualisasi kemandirian Petani-Nelayan tersebut,

seperti: (1) **Pergelaran Model-Model Usahatani** yang menguntungkan dari semua sub sektor yang bersifat spesifik lokalita; (2) **Temu Wicara** dengan Menteri, Pejabat Tinggi dan Tertinggi Negara yang relevan, serta tokoh-tokoh masyarakat dan Perguruan Tinggi untuk mencari titik temu dalam menentukan kebijakan nasional, regional dan lokal; (3) **Temu Usaha**, untuk menjalin kemitraan usaha antara petani-nelayan dan pengusaha dengan dukungan pemerintah daerah masing-masing; (4)

Kegiatan-kegiatan lain seperti: **Jaringan Informasi dan Inovasi Teknologi, Studi banding, Temu Karya, Temu ASEAN/GNB.**

Kita harapkan PENAS X-Agribisnis 2001, benar-benar dapat mendorong kemandirian petani-nelayan Indonesia. Sebab kemandirian dan ketangguhan

petani-nelayan sudah merupakan tuntutan di era globalisasi ini. Namun disisi lain kemandirian petani-nelayan bukan hanya tanggung jawab petani-nelayan itu sendiri, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara petani dengan petani dan petani dengan pemerintah sebagai mitra petani. Di samping itu petani-nelayan tidak akan mandiri jika tidak ada kepercayaan diantara kita sebagai mitra petani kepada petani. Oleh sebab itu diantaranya harus terdapat saling asih, asuh dan asah, semoga. (La)

Kemandirian usahatani harus dicirikan oleh pengembangan diri secara terus menerus atau berkesinambungan dan menyeluruh.



Banyak Ragam Pengendalian Hama Walang Sangit Tanpa Insektisida

Sugiarno

PENINGKATAN dan pelestarian swasembada pangan khususnya beras banyak ditentukan oleh berhasil tidaknya cara budidaya yang baik. Salah satu kendala yang ikut menentukan dalam usaha pelestarian swasembada beras adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pada umumnya hama tanaman padi di daerah sawah tadah hujan yang sering dan banyak menyerang adalah hama walang sangit.

Di dalam usaha mengendalikan hama tersebut pada umumnya sudah terbiasa menggunakan cara yang mudah dan praktis yaitu dengan menggunakan insektisida, dimana dalam penggunaannya tidak tahu/ belum tahu atau masa bodoh akan dampak efek sampingnya. Namun setelah pemerintah melalui Departemen Pertanian (Tanaman Pangan) mencanangkan adanya program PHT, lambat laun dalam diri para petani mulai timbul kesadaran akan dampak efek samping dari pemakaian insektisida ini.

Maka seiring dengan waktu berlalunya program PHT tersebut para petani sudah mulai tergugah untuk mencari

peluang pengganti yang bisa untuk menggantikan kedudukan insektisida. Mengingat di dalam program PHT ditanamkan usaha budidaya tanaman yang sedikit mungkin menggunakan insektisida atau cenderung ke arah alami artinya dengan kata lain dikembangkan usaha untuk menimba pengalaman budidaya petani terdahulu sebelum adanya bahan kimiawi. Akhirnya sekarang banyak dijumpai disana sini di daerah-daerah sampai dipelosok terpencil temuan-temuan cara petani untuk mengendalikan hama tanpa menggunakan insektisida, biarpun hasil temuannya ada sebatas mengusir, namun dirasakan sudah cukup mampu untuk mengendalikan hama tertentu.

Disini penulis fokuskan hanya pada hasil temuan cara mengendalikan hama walang sangit yang banyak dijumpai di daerah pantura khususnya di Kabupaten Rembang. Dari hasil temuan-temuan itu hampir semuanya menggunakan bahan-bahan yang murah, mudah didapat dan terbukti cukup efektif mengendalikan hama walang sangit. Di bawah dipaparkan temuan cara petani mengendalikan hama

walang sangit berikut bahan dan cara menggunakannya.

Adapun cara-cara dan bahannya antara lain:

Kotoran Ayam, Ajir Bambu, Botol Aqua Bekas, Caranya:

- Buat 2 botol aqua masing-masing dipotong bawahnya kurang lebih 3 Cm, kemudian bagian yang dipotong disambungkan.
- Sebelum dipasang di sawah dimasukan terlebih dahulu kotoran ayamnya (lebih baik kotoran ayam buras) dan diberi sedikit air.
- Pemasangan perangkat ini dengan cara digantungkan dengan ajir setinggi tanamannya, dan dilakukan pada saat tanaman mulai berbunga sampai fase masak penuh (bulir gabah dipijit sudah keras).
- Kotoran ayam yang ada di dalam botol supaya diganti bila baunya sudah berkurang dan walang sangit yang sudah terperangkap/masuk dalam botol segera dibunuh dengan cara menutup botol dan segera dipasang kembali ke sawah.

Terasi Basi, Sabut Kelapa, Ajir Bambu, Caranya:

- Terasi dihancurkan kemudian tambahkan air secukupnya.
- Remdamkan sabut kelapa ke dalam air terasi tersebut selama 6 - 10 jam.
- Sabut kelapa yang sudah direndam diikat kecil-kecil lalu ditusuk dengan ajir kemudian ditancapkan di sawah dengan jarak 1 jengkal di atas malai.



Pengendalian organisme pengganggu tanaman tanpa pencemaran lingkungan (Aa)

- Jarak antara ajir 10 - 15 M.
- Setelah walang sangit mengumpul segera tutup dengan plastik dan remas.
- Adapun apabila sabut kelapa pada ajir baunya sudah berkurang dapat dilakukan perendaman lagi pada air terasi dan segera di pasang lagi.

Kapur Barus, Kantong Plastik Bening, Ajir Bambu, Caranya

- Kapur barus dimasukan dalam kantong plastik kemudian diberi lubang-lubang kecil, diikatkan pada ajir dan siap dipasang atau ditancapkan di sawah



insektisida mempertahankan kualitas dan mengurangi

setinggi malai atau di atas malai, dengan jarak antar ajir 5 – 6 M.

- Pemasangan ini mulai dari tanaman berbunga sampai fase masak penuh.
- Catatan cara ini hanya efektif untuk menolak datangnya hama walang sangit tetapi tidak membunuh.

Karbit, Wadah Tempat Karbit, Caranya :

- Karbit taruh dalam suatu tempat dan diberi sedikit air tempatkan pada tengah petakan sawah.
- Pemasangan pada waktu tanaman keluar malai sampai masak penuh.

- Cara ini sangat efektif menolak datangnya hama walang sangit.

Belerang, Caranya :

- Buatlah asap belerang mulai tanaman keluar malai sampai masak penuh di usahakan dilakukan berkali-kali.
- Caranya hanya efektif menolak datangnya hama walang sangit.

Gamping Kawur, Caranya :

- Gamping kawur disebarakan merata di pertanaman pada saat tanaman keluar malai sampai fase masak penuh dengan cara dilakukan berulang-ulang.
- Catatan cara ini efektif menolak serangan walang sangit dan hanya efektif dilakukan bila ada hujan.

Abu Dapur, Caranya :

- Abu Dapur disebarakan merata di pertanaman pada saat tanaman keluar malai sampai fase masak penuh dengan cara dilakukan berulang-ulang.
- Catatan cara ini efektif menolak serangan walang sangit dan hanya efektif dilakukan bila ada hujan.

Tembakau, Caranya :

- Tembakau direndam semalam diberi satu sendok sabun tiap satu Kg dan siap disemprotkan kepertanaman.
- Bisa sebagai rancun kontak.

Biji Mahoni, Caranya :

- Biji mahoni ditumbuk halus ditambah air dan satu sendok sabun siap disem-

- protkan ke tanaman.
- Bisa sebagai racun kontak.

Biji Bengkuang, Caranya :

- Biji bengkuang ditumbuk halus diberi air dan sedikit sabun siap disemprotkan ke pertanaman
- Bisa sebagai racun kontak

Bangkai Ketam/Yuyu, Caranya :

- Bangkai yuyu ditusuk ajir dan siap ditancapkan di sawah.
- Setelah walang sangit mengumpul di kerudung plastik dan diremas dengan tangan.
- Cara ini sebagai perangkat.

Gadung, Caranya :

- Gadung diparut dan diperas airnya diberi sedikit sabun dan siap disemprotkan.
- Bisa sebagai rancun kontak

Tanaman Pepaya dan Buah Mudanya, Caranya :

- Tanaman pepaya (daunnya dan buah mudanya) dicacah halus direndam air semalam siap disemprotkan.
- Bisa sebagai rancun kontak.

Nimba, Caranya :

- Tanaman Nimba (daun, kulit dan akar/bijinya) direbus dengan air dibiarkan semalam dan siap disemprotkan.

- Bisa sebagai racun kontak.

Pocung, Caranya :

- Buah pocung ditumbuk direndam semalam ditambah sedikit sabun siap disemprotkan.
- Bisa sebagai racun kontak.

Sedangkan temuan paling akhir yang sudah mengarah kekomersial dan sudah banyak diperjualbelikan adalah **Agens**

Hayati Cair dimana bekerjanya bila disemprotkan ke tanaman akan mampu menimbulkan wabah penyakit pada hama walang sangit. Temuan-temuan cara mengendalikan hama walang sangit tanpa insektisida ini sudah tentu banyak lagi cara, bentuk dan ragamnya di setiap daerah namun di sini

umum dilakukan pada tempat yang ada sawah tadah hujannya.

Pada akhirnya pengendalian hama walang sangit tanpa insektisida secara tidak langsung di lapangan, mempertahankan kualitas, mengurangi pencemaran lingkungan dan bahaya residunya sehingga secara tidak langsung bisa menekan biaya produksi dan diharapkan pemantapan swasembada beras bisa juga terwujud. (Aa)

(Sugiarno, PHP Kabupaten Rembang-Jateng)

Pengendalian hama walang sangit tanpa insektisida, mempertahankan kualitas, mengurangi pencemaran lingkungan dan bahaya residu



LOKAKARYA NASIONAL

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

SALAH satu dampak globalisasi adalah liberalisasi perdagangan. Dari sisi positif dapat dilihat bahwa liberalisasi perdagangan menawarkan *peluang kerja* dan *peluang berusaha* termasuk di bidang pertanian. Peluang tersebut tersedia baik secara domestik, regional, maupun internasional dalam iklim yang kompetitif dan tentunya menuntut daya saing tinggi bagi pelakunya. Untuk mencapai daya saing yang tinggi dapat di penuhi oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkemampuan akademik, profesional, berjiwa wirausaha dan kinerja yang tinggi.

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah (OTODA),

maka pengembangan kualitas SDM pertanian sebagian besar menjadi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Pemerintah Daerah Otonomi. Oleh karenanya dalam mempersiapkan SDM pertanian yang berkualitas tersebut, perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan yang matang dengan visi jauh ke depan.

Menyikapi kondisi di atas Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian menyelenggarakan Lokakarya Nasional yang mengambil tema *Meningkatkan SDM Pertanian yang Berdaya Saing Global* dengan sub tema *Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian untuk Pengembangan Sistem Agribisnis*.

Lokakarya tersebut telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2001 di Auditorium Kampus Departemen Pertanian, Ragunan – Jakarta Selatan, dengan tujuan memahami konsep persaingan global untuk pengembangan SDM Pertanian dan memahami implikasi Otda terhadap pengembangan pertanian.

Dalam pidato pembukaannya, Menteri pertanian Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Departemen Pertanian mengemukakan bahwa, untuk mencapai visi pembangunan pertanian, yaitu *Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera, Khususnya Petani, melalui Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis yang Berdaya Saing, Berkerakyatan, Berkelanjutan dan Terdesentralisasi*, kita perlu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal (utamanya globalisasi) maupun internal (utamanya otonomi) yang berkembang di sekitar kita, khususnya yang langsung berkaitan dengan tuntutan perkembangan SDM pertanian. Implikasi dari kedua faktor tersebut memang bukan hal yang sederhana. Menteri Pertanian juga mengatakan bahwa, berkembangnya tuntutan akan peningkatan daya saing para pelaku ekonomi, bermuara pada perlunya peningkatan daya saing SDM Pertanian, khususnya petani. Implikasi lainnya adalah berkembangnya tuntutan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa di setiap bidang kehidupan.

Acara panel diskusi tersebut dihadiri oleh sekitar 250 orang yang terdiri dari unsur pejabat struktural dan fungsional lingkup Departemen Pertanian dan departemen terkait, para Kontaktni-nelayan, swasta/



pengusaha, dan organisasi profesi bidang pertanian. Dalam kesempatan itu hadir beberapa pembicara yang merupakan pakar-pakar di bidangnya, mereka adalah: Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat (Pembangunan Ekonomi melalui Pengembangan Pertanian); Dr. Sinis Munandar, MS (Pengembangan SDM Pertanian "Masa Depan"); Dr. Ir. Yuswandi (Pembangunan Pertanian SDM Sektor Pertanian); Dr. Ir. Ato Suprpto, (Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Agribisnis); Lukman Kudonarpodo, SH, M.I.R; dan Ir. H. Daud Husni Bastari (Pengembangan SDM Pertanian Berwawasan Agribisnis), dengan para pembahas utama Dr. Ir. Syamsul Maarif, M.Sc; Ir. Sigit H Samsu; Ir.



Unggul Abinowo; Dr. Andi Malarangeng; Syaukani (Bupati Kutai Timur); dan A.R. Ramli.

Ir. Sigit H. Syamsu menyatakan bahwa, pengembangan SDM pertanian yang menganut azas : *catur unsur, catur gatra, catur pilar, dan catur strategi*, kurang fokus. Salah satunya dapat dilakukan dengan membangun sentra pertanian yang bisa berfungsi sebagai percontohan, media pembelajaran agribisnis, dan sebagai sumber informasi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Ir. Unggul Abinowo dan Prof. Dr. S. Gunawan Satari menambahkan bahwa, perlu upaya-upaya penyesuaian antara konsep peningkatan SDM dari Badan

Pengembangan SDM dengan kondisi petani Indonesia saat ini. Oleh karena itu sistem program pengembangan SDM perlu disederhanakan dan lebih rinci lagi agar konsep-konsep Badan Pengembangan SDM dapat dioperasionalkan di lapangan.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Agribisnis pada Era Otoda

Diungkapkan oleh Dr. Ir. Ato Suprpto, Departemen Pertanian telah menetapkan bahwa strategi dalam membangun perekonomian nasional adalah melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dengan strategi tersebut diyakini bahwa, perekonomian nasional dapat pulih dengan lebih cepat, berjangka panjang, sehat, dan merata. Secara implisit Prof. Dr. Azril Ashari juga mengungkapkan bahwa, pembangunan pertanian tidak cukup dilihat dari kualitas SDM-nya saja, akan tetapi aspek usahanya perlu juga mendapat perhatian.

Diperkuat oleh Dr. Ir. Ato Suprpto bahwa Badan Pengembangan SDM perlu menciptakan SDM agribisnis agar mampu melihat trend pasar (analisa pasar) sehingga bersaing di tingkat global. Upaya tersebut dapat berhasil, bila kita mampu menyiapkan penyuluhan pertanian yang berwawasan agribisnis, baik on farm dan off farm serta membangun lembaganya (jaringan informasi).

Sejalan dengan ungkapan Ir. Ahmad Kamil, M.Si bahwa, Badan Pengembangan SDM pertanian perlu membangun lembaga yang dapat memberikan pelayanan kliennya dengan sebaik-baiknya, karena harus diakui bahwa faktanya petani/pengusahalah yang

menanggung 100 % resiko (biaya) usahanya. Selain itu pemerintah seyogyanya tidak melakukan distorsi pada mekanisme pasar. Akibat buruk dari kondisi yang berlawanan dari anggapan Dr. Ato Suprpto adalah, kita akan tertinggal oleh negara-negara berkembang lainnya, karena pada saatnya perdagangan bebas diberlakukan, barang-barang termasuk komoditi pertanian akan masuk dan keluar *tanpa barrier* (bebas).

Untuk mendukung pelaksanaan Otoda, program-program aksi Badan Pengembangan SDM harus terfokus kepada program pengembangan SDM di tingkat kabupaten/kota, juga sebanyak mungkin mendengarkan suara petani. Ir. H. Daud Husni Bastari malah menyarankan pendidikan pertanian dilakukan sedini mungkin, melalui sekolah-sekolah umum dengan kurikulum yang jelas. Selain itu Departemen Pertanian harus selalu melakukan kajian-kajian dengan materi pendidikan, dari hasil tersebut akan diketahui kebutuhan SDM pertanian di lapangan.

Ketidak seimbangan dalam pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menurut Dr. Andi Malarangeng mengakibatkan keinginan daerah untuk dapat mengatur perekonomian daerahnya sendiri. Sebagai contoh pada masa lalu, segala pajak disegala bidang termasuk pertanian yang diberlakukan di daerah, menjadi pemasukan kas pemerintah pusat. Oleh karenanya menurut Andi bahwa, baik pembangunan lembaga-lembaga pertanian maupun pendapatan dari sektor pertanian harus merupakan *sharing* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari diskusi ini adalah, pembangunan pertanian harus dikembalikan kepada hakekatnya yaitu: mengembalikan pertanian kepada mekanisme pasar, memberdayakan masyarakat agar mampu mengantisipasi dan mengendalikan mekanisme pasar tersebut, dan melaksanakan Otoda yang berarti mengembalikan kewenangan kepada masyarakat, petani dan pemerintah daerah. Dengan demikian secara mandiri mereka (petani dan pemerintah daerah) mempunyai kewenangan untuk merumuskan, merencanakan, melaksanakan, menikmati hasil dan melestarikan usaha serta lingkungannya.

Langkah pembangunan pertanian sebaiknya diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi keluarga tani ke arah kemandirian petani. Indikator pemberdayaan masyarakat harus terlihat melalui: meningkatnya daya saing SDM yang mandiri, meningkatnya ekonomi masyarakat tani, kondisi prasarana yang baik, mapannya kelembagaan tani, dan adanya program berkelanjutan. Dibutuhkan komitmen pemerintah untuk mau mengembangkan sistem, mekanisme, dan instrumen kebijakan pembangunan SDM pertanian. Salah satunya adalah membangun sentra-sentra agribisnis yang berfungsi sebagai percontohan dan media pembelajaran untuk pemberdayaan petani. Otonomi daerah harus dipandang sebagai realisasi dari keinginan politik untuk memberdayakan masyarakat, dengan upaya penanggulangan pengangguran, pengembangan industri berbasis, pengembangan teknologi-inovasi spesifik lokasi, peningkatan pendapatan ekonomi daerah. (Rm)

Sebuah Makna di Balik

Pertemuan *Tenth Asean Farmers' Week 2001* di Malaysia



Peserta Tenth Asean Farmers' Week 2001 (Aa)

MALAYSIA dan juga beberapa negara Asean lainnya, sedang bergegas menuju suatu wawasan baru untuk *mentransform* sistem pertaniannya menjadi pertanian modern yang mempunyai daya saing dalam kerangka menghadapi penetrasi arus global dan persaingan pasar bebas, itulah yang *atmosfir* yang pertama kali terasa tatkala memasuki pertemuan *Tenth Asean Farmers' Week 2001* di Malaysia, 10 sampai dengan 16 Agustus 2001 yang lalu.

Asean Farmers' Week adalah kegiatan dari anggota negara di Asean yang bekerja sama pada kepedulian yang sama terhadap

Pertanian dan Kehutanan, sejak tahun 1990 kegiatan ini diselenggarakan pada setiap tahun dengan tempat bergilir di antara negara-negara di Asean. Tahun lalu (2000) kegiatan ini di selenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dan tahun ini (2001) Malaysia ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan *The Tenth Asean Farmers' Week* yang bersamaan waktunya dengan kegiatan *The National Farmers' Livestock Rearers And Fishermen's Day 2001*.

Dengan harapan wawasan baru tersebut, pada kegiatan ini juga ingin segera meraih bagaimana membangun semangat



kerjasama dan kebersamaan 'rumpun' Asean dalam membangun sektor pertanian dan kehutanan secara berkelanjutan dalam menghadapi persaingan global, sehingga Kegiatan-kegiatan dalam *The Tenth Asean Farmers' Week* ini dengan tujuan-tujuannya didisain untuk memberikan wawasan dan pengalaman untuk menciptakan keterkaitan dan saling pengertian yang lebih mendalam diantara sesama anggota di negara Asean.

Secara ringkas kegiatan pokok *The Tenth Asean Farmers' Week* adalah (1) menjadi tamu kehormatan dalam Upacara Pembukaan *The National Farmers' Livestock Rearers. And Fishermen's Day 2001*, (2) mengunjungi projek dan berbagai kegiatan petani Malaysia dan (3) menghubungi Badan/Instansi yang melayani/mendukung kelembagaan Petani. Dengan tujuan (1) memperkuat kerjasama antara petani, perugas dan pengusaha, (2) saling memberi ide dan informasi tentang teknologi dan sumberdaya lainnya yang membangun keberhasilan suatu program/proyek untuk petani dan koperasi petani, (3) mempromosikan usaha-usaha yang sesuai dan membangun jaringan kerjasama

diantara organisasi dan departemen yang memiliki kesamaan dan keterkaitan sasaran, (4) memperkuat semangat kebersamaan dan kerjasama dengan sesama anggota Asean, (5) saling berbagi pengalaman terhadap berbagai budaya dan tradisi yang ada diantara sesama anggota negara

Perjalanan mengikuti pertemuan *Tenth Asean Farmers' Week 2001* yang cukup padat dan singkat, sehingga kebanyakan perjalanan ini hanya memberi kesempatan untuk sekedar melihat apa yang disajikan, kurang memberi peluang yang banyak untuk menggali dan mendalami dari apa yang dilihat. Namun karena pertemuan ini, dibuat suasana keakraban sesama anggota, maka banyak temuan penting yang dapat memberi makna, inspirasi dan sekaligus energi untuk pengembangan pertanian di tanah air tercinta ini.

Makna yang paling pekat adalah, kesadaran mereka yang sangat tanggap terhadap dinamika perubahan dan kemauannya secara beramai-ramai untuk menghadapi persaingan tersebut, telah menjadi semangat untuk segera mengadakan pembaharuan menuju pertanian modern yang mereka inginkan. Malaysia yang didukung oleh kepemimpinan dengan visi yang jauh ke depan dan dengan misi '*Peranian Modern Membina Negara*' dalam pertemuan ini, setidaknya telah berhasil memberi gambaran menyeluruh tentang kesiapan dan kekuatan Malaysia dalam pertarungan di masa depan nantinya.

Gambaran pertama, didapat dari Pertemuan dalam perayaan Hari Peladang, Peternak dan Nelayan Kebangsaan 2001 yang menampilkan beragam kegiatan.

khususnya Pameran Info ternak yang mereka unggulkan. Pertemuan yang dihadiri ribuan wakil peladang, peternak dan nelayan ini sangat meriah dan dipenuhi dengan beragam produk dengan standar mutu yang siap dipasarkan. Tampak komoditas ternak dan sayuran akan menjadi unggulan mereka dalam membangun pertaniannya

Gambaran ke dua, didapat dari perjalanan menuju *Cameron highlands*, disini Malaysia menyajikan agroekosistem dataran tinggi dimana sayuran dan hortikultura tumbuh dengan subur. Didukung dengan dengan kesiapan sarana dan prasarana serta pelayanan dari aspek teknologi modern yang mendukung, maka di daerah ini berkembang usaha produktif dari sayuran/hortikultura dari hulu ke hilir. Usaha-usaha keluarga, bisnis pribadi

sampai dengan usaha asosiasi komoditas ini berkembang dengan keragaman dan menyentuh tiap lapisan masyarakat. Komoditas seperti tomat, cabe, kubis, kentang, ditambah dengan berbagai jenis bunga serta komoditas langka seperti Cactus diusahakan masyarakat di wilayah ini dengan skala besar.

Gambaran ketiga, ditampilkan oleh Organisasi Petani dari Sungai Manik/Labu Kumbang, organisasi ini berpikir jauh ke depan untuk mendapatkan usaha pertanian secara berkelanjutan. Sasaran mereka tidak hanya menyajikan pelayanan dalam bentuk fisik semata berupa sarana prasarana untuk usaha pertanian, tetapi juga kegiatan yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap pendidikan dan kegiatan sosial lainnya yang berkaitan



Cactus Valley di Cameron Highlands Malaysia (Aa)

dengan kehidupan mereka sehari-hari. Organisasi semacam ini telah memberi dukungan yang sangat nyata pada pengembangan usahatani dengan memberikan pinjaman lunak pada saat petani kekurangan modal dan menumbuhkan perilaku menabung pada saat petani berlebihan, suatu sistem yang menumbuhkan keseimbangan dan kewaspadaan terhadap apa yang akan terjadi kemudian.

Gambaran ke-empat, tatkala mengunjungi *Women's Extension Group Project*, yang menggarap para perempuan *miskin* agar mempunyai usaha yang produktif untuk meningkatkan pendapatannya. Persiapan kelompok ini untuk beranjak menjadi besar dalam usaha yang produktif dilakukan melalui suatu proses

yang *cerdas* khususnya dalam menetapkan pilihan usaha yang akan dikembangkannya, yang didasarkan pada penciptaan permintaan pasar melalui inovasi kreatif kelompoknya.

Gambaran ke-lima, adalah ketika mengunjungi *Malaysia Agriculture Research and Development Institute (MARDI)*, pada lembaga ini diteknologi diciptakan adalah juga untuk menjawab tantangan bisnis usaha di dunia pertanian. Teknologi Modern yang menjadi kekuatan pertanian di Malaysia dikembangkan dan ditransfer kepada sasaran dengan berbagai pendekatan, agar terjadi difusi teknologi kepada masyarakat pengguna dalam waktu secepat-cepatnya. Satu hal yang menarik bahwa penciptaan teknologi yang dilakukan oleh MARDI juga mempertimbangkan



Pasar buah dan bunga di Cameron Highlands Malaysia (Aa)



Rumah kaca MARDI (Aa)

ketersediaan bahan yang ada di lingkungannya, seperti limbah kelapa sawit yang banyak terbuang dapat disulap (dengan teknologi yang dihasilkan MARDI) menjadi makanan ternak yang bermutu. MARDI menunjukkan kapasitasnya sebagai penyedia teknologi dan memasarkannya dengan menjanjikan keunggulan komparatif wilayah.

Gambaran ke-enam, adalah dengan ditunjukannya suatu kawasan administrasi perkotaan yang dibangun secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kebutuhan hidup manusia. Kota yang dibangun di luas lahan sekitar 50.000 ha, sebagian besar terdiri dari hutan buatan, danau sumber air buatan, mesjid terbesar tempat ibadat, tempat bermain/berekreasi, sekolah-sekolah tempat pendidikan selebihnya adalah istana raja, tempat pemukiman serta tempat belanja dan bisnis bagi penduduk dunia. Lima tahun ke depan kota ini merupakan kota ideal yang dicita-citakan

penduduk Malaysia, dimana masyarakat mendapat lingkungan yang semakin memanjakan segala keinginannya.

Gambaran ke-tujuh, adalah suatu harmoni yang membawa pesan moral untuk memperhalus hubungan antar manusia dengan ditunjukkannya bermacam budaya dan tradisi yang dimiliki masyarakat Malaysia. Gambaran demi gambaran dalam perjalanan mengikuti *Tenth Asean Farmers' Week* ini merupakan suatu benang merah yang menunjukan *how strong Malaysia is!* Tetapi jika direnungkan lebih mendalam, mungkin bisa menjadi semacam *inspirasi* dan *energi* pendorong atau bahkan menjadi *cermin* bagi kita, bangsa Indonesia. Dan di tahun depan (2002) nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan *Asean Farmers' Week* ini, tentunya apa yang akan kita sajikan dalam kegiatan ini memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang (*Delegasi Indonesia: Tasrif Abubakar, H. Oo Sutisna, Hotman dan Andi Sumarga*).

ENAM INDIKATOR TIM YANG BERHASIL

Aturan Kerja

- Adil dan konsisten.
- Diketahui oleh semua anggota kelompok.
- Dapat dinegosiasikan kembali bila terjadi perubahan.
- Memperhatikan beban kerja, akuntabilitas dan waktu penyelesaian kerja.

Standar Kerja

- Mengutamakan kinerja tinggi dan keunggulan.
- Membangun semangat berprestasi.
- Mengembangkan kemampuan kelompok untuk berorientasi hasil (mengembangkan kohesi dan inovasi).
- Setiap anggota kelompok memperoleh penjelasan akan tugas-tugasnya.
- Melakukan pembaharuan dan penilaian terhadap pengetahuan kelompok dan individu.
- Pelatihan secara berkesinambungan.

Dinamika Kelompok

- Memiliki rasa setia kawan yang tinggi.
- Bangga akan keberhasilan kerja.
- Setiap anggota dapat beradaptasi dengan baik.
- Setiap anggota dinilai berdasarkan kontribusinya.
- Mengembangkan keragaman.
- Terbuka terhadap ide dan kreativitas.
- Percaya dan mau bekerjasama.

Potensi Konflik

- Setiap anggota tidak merasa takut ataupun diabaikan dalam kelompok atau organisasi.
- Adanya saling menghargai diantara anggota kelompok.
- Solusi dibangun secara bersama dan diamankan oleh semua anggota.

Kepemimpinan

- Keseimbangan perhatian antara kepentingan anggota sebagai manusia dengan produktivitas.
- Bekerja untuk pengembangan kelompok.
- Tugas didelegasikan sesuai dengan kompetensi dan minat, bukan karena perintah yang tak berdasar.
- Keberhasilan kerja dikomunikasikan pada kelompok lainnya.
- Saling berbagi tugas dan pekerjaan yang didasarkan kemampuan kerja.

Pengambilan Keputusan

- Didasarkan pada pencapaian tujuan kelompok.
- Setiap anggota kelompok berpartisipasi sesuai dengan kompetensi dan tugas kerjanya.
- Tidak ada rahasia. Setiap informasi disampaikan pada anggota sesuai dengan kepentingannya.

EKSTENSIA menerima :

Tulisan yang bersifat aktual, tidak berkepanjangan, padat, mudah dibaca dan dimengerti, dengan gaya yang enak dibaca. Jumlah 350 kata atau kelipatan bulatnya diketik rapih dan ditandatangani oleh penulis, dikirim ke Ekstensia dengan dilengkapi Identitas/photo copy KTP/ Karpeg Penulis.

Untuk rubrik-rubrik :

WAHANA

Tulisan dan gambar/fotonya, berupa feature/berita kisah dan profil dari suatu kelembagaan penyuluhan pertanian, bertujuan untuk membangun motivasi berpartisipasi dalam pembangunan pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SOSOK

Tulisan dan gambar/fotonya berupa feature dari sosok Penyuluh Pertanian untuk kontak tani Nelayan/petani maju yang melaporkan keberhasilan (succes story), yang bertujuan untuk sebagai teladan bagi orang lain yang seprofesi.

WAWASAN

Tulisan atau informasi bebas dengan gambar/fotonya, berisi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, atau pengalaman lapangan dibidang pertanian, atau tulisan dari seorang ahli (peneliti, praktisi) dibidang pertanian, yang bertujuan untuk menambah wawasan.

OPINI

Berupa tulisan pembaca yang merupakan tulisan asli, kondidisi faktual dilapangan yang mengemukakan masalah, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan pertanian khususnya penyuluhan pertanian, disertai dengan pemikiran tentang pemecahan masalahnya, (maksimum 350 kata).

SWADAYA

Tulisan dengan gambar/ditanya dari kegiatan Swadaya KTNA/Petani-Nelayan bertujuan untuk memotivasi/menggugah keswadayaan Petani-Nelayan yang lain.

GEMA

Tulisan atau berita/informasi bebas, dengan gambar/fotonya, berisi segala sesuatu berkaitan dengan organisasi profesi, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pakar dan Penyuluh Pertanian dalam pengembangan organisasi dan profesinya, baik di pusat maupun cabang-cabangnya di daerah.

Ekstensia mempunyai wewenang yang mandiri untuk menentukan tulisan yang akan dimuat, sedangkan tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan apabila disertai dengan perangko yang cukup.

